

# Berita Jumat 24 Juli

## Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Jumat, 24 Juli 2026 menunjukkan bahwa perekonomian global masih menghadapi berbagai tekanan yang saling berkaitan. Ketidakpastian tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan proteksionis, meningkatnya ketegangan geopolitik, kenaikan harga energi, serta tekanan inflasi yang kemudian memengaruhi arah kebijakan bank sentral di berbagai negara. Amerika Serikat, misalnya, kembali memperkuat kebijakan tarif impor dengan mengenakan bea masuk antara 10% hingga 12,5% terhadap sebagian besar mitra dagangnya dengan alasan adanya dugaan kegagalan dalam mencegah praktik kerja paksa dalam rantai pasok. Kebijakan tersebut kemudian mendapat penolakan dari sejumlah negara sekutu AS di Asia, seperti Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Jepang, karena dinilai tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan kesepakatan perdagangan yang telah dibuat. Meskipun negara-negara tersebut belum mengambil langkah balasan secara langsung, muncul kecenderungan untuk memperkuat hubungan dagang satu sama lain guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. Dengan demikian, kebijakan perdagangan AS tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral dengan negara-negara mitranya, tetapi juga berpotensi meningkatkan fragmentasi perdagangan dan ketidakpastian dalam perekonomian global.

Ketidakpastian perdagangan tersebut kemudian semakin kompleks karena pada saat yang sama dunia juga menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi dan meningkatnya risiko geopolitik. Konflik di Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan pada jalur transportasi dan perdagangan energi mendorong harga minyak Brent kembali menembus level US\$100 per barel. Kenaikan harga minyak tersebut kemudian meningkatkan risiko inflasi di berbagai negara karena biaya energi yang lebih tinggi dapat mendorong kenaikan biaya produksi, transportasi, dan harga barang. Tekanan tersebut juga terlihat di Jepang, ketika inflasi inti meningkat menjadi 1,6% pada Juni 2026 dan pelemahan yen hingga mendekati level terendah dalam empat dekade menyebabkan biaya impor energi dan pangan semakin mahal. Kondisi ini membuat Bank of Japan harus mempertimbangkan keseimbangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, sehingga peluang kenaikan suku bunga pada akhir tahun semakin terbuka. Situasi serupa juga terlihat di Eropa, ketika European Central Bank mempertahankan suku bunga deposit pada level 2,25%, tetapi tetap memberikan sinyal bahwa kenaikan suku bunga dapat dipertimbangkan apabila kenaikan harga minyak dan gas terus meningkatkan tekanan inflasi. Oleh karena itu, kenaikan harga energi yang dipicu oleh ketegangan geopolitik pada akhirnya turut memengaruhi kebijakan moneter negara-negara besar dan mempersempit ruang bagi bank sentral untuk melakukan pelonggaran kebijakan.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, investor global juga berusaha melindungi asetnya melalui instrumen yang dianggap lebih aman, salah satunya emas. Hal ini terlihat dari impor emas China yang mencapai sekitar 173 ton pada Juni 2026, atau menjadi yang tertinggi dalam dua tahun. Tingginya impor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, investor, dan perbankan China meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko ekonomi dan geopolitik. Ketika harga emas mengalami koreksi, investor memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kepemilikan, sementara penguatan renminbi dan meningkatnya kebutuhan bank terhadap emas fisik turut mendorong kenaikan impor. Selain itu, meningkatnya arus dana ke ETF berbasis emas menunjukkan bahwa investor masih berupaya menjaga nilai asetnya di tengah ketidakpastian perdagangan, konflik geopolitik, risiko inflasi, dan tingginya suku bunga. Dengan demikian, perkembangan internasional secara keseluruhan memperlihatkan bahwa perekonomian global menghadapi tekanan yang saling memperkuat, yaitu proteksionisme yang mengganggu perdagangan, konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi, inflasi yang membatasi pelonggaran

moneter, serta tingginya suku bunga negara maju yang dapat meningkatkan tekanan terhadap negara berkembang.

Tekanan global tersebut kemudian memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui nilai tukar rupiah, pasar keuangan, biaya impor energi, dan kondisi APBN. Rupiah yang ditutup pada level Rp17.943 per dolar AS menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih cukup kuat, terutama karena tingginya harga minyak meningkatkan kebutuhan devisa untuk impor energi. Pada saat yang sama, kenaikan imbal hasil obligasi di berbagai negara juga meningkatkan biaya pembiayaan global dan dapat mendorong arus modal menjadi lebih fluktuatif. Kondisi ini semakin diperkuat oleh kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama karena pertumbuhan ekonomi yang masih cukup kuat dan inflasi yang diperkirakan kembali meningkat. Apabila kebijakan suku bunga tinggi tersebut terus berlangsung, dolar AS dan aset keuangan Amerika Serikat akan tetap menarik bagi investor global, sehingga negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berpotensi menghadapi tekanan terhadap nilai tukar dan arus modalnya. Oleh sebab itu, perkembangan ekonomi internasional menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Menghadapi tekanan tersebut, pemerintah Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp132 triliun. Tambahan kebutuhan tersebut kemudian mendorong kenaikan proyeksi belanja negara menjadi Rp3.942,4 triliun dan defisit APBN diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau sekitar 2,85% terhadap PDB. Meskipun defisit tersebut meningkat dibandingkan target awal, pemerintah masih menilai bahwa kondisi fiskal tetap berada dalam batas yang aman karena masih di bawah batas maksimal 3% dari PDB. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan harga minyak tidak akan mengganggu pelaksanaan stimulus ekonomi pada semester II 2026 karena perencanaan sebelumnya telah memperhitungkan kemungkinan harga minyak berada pada level yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemerintah berusaha mempertahankan keberlanjutan program ekonomi sekaligus mengendalikan dampak kenaikan biaya energi terhadap keuangan negara.

Selain melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga berupaya memperkuat sumber pembiayaan dengan melakukan diversifikasi pasar utang. Penerbitan Panda Bond senilai CNY7 miliar atau sekitar US\$1 miliar menunjukkan bahwa Indonesia berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang berbasis dolar AS. Tingginya permintaan investor terhadap surat utang tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik di mata investor internasional. Namun, pemerintah tetap menjaga agar penerbitan tidak dilakukan secara berlebihan sehingga harga surat utang tetap kompetitif dan ruang untuk penerbitan berikutnya tetap terbuka. Upaya pengelolaan pembiayaan tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pemerintah berupaya mencari skema penyelesaian yang tidak terlalu membebani APBN, termasuk melalui penyiapan special mission vehicle. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berusaha memperoleh pembiayaan baru, tetapi juga berupaya mengelola kewajiban yang sudah ada agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan dan program prioritas lainnya.

Meskipun menghadapi tekanan dari kondisi global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan dan tetap memiliki peluang untuk tumbuh. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 diproyeksikan berada di sekitar 5,4%, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal I sebesar 5,61%, tetapi pemerintah masih optimistis bahwa kinerja ekonomi dapat membaik pada semester II. Optimisme tersebut didukung oleh kondisi likuiditas yang relatif terjaga sehingga diharapkan dapat menopang konsumsi, investasi, dan aktivitas dunia usaha. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif tersebut, sektor UMKM menghadapi tantangan yang cukup

besar. Kredit UMKM hingga Juni 2026 hanya tumbuh sekitar 1% menjadi Rp1.519,1 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang mencapai 12,6%. Perlambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan UMKM bukan hanya terletak pada ketersediaan pembiayaan, tetapi juga berkaitan dengan melemahnya daya beli, perubahan pola konsumsi masyarakat menuju platform digital, belum kuatnya keterhubungan UMKM dengan rantai pasok, tekanan produk impor, serta masih terbatasnya kapasitas manajemen dan literasi keuangan sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan penyaluran kredit perlu diikuti dengan penguatan kemampuan usaha agar pembiayaan yang diterima benar-benar dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan UMKM.

Atas dasar permasalahan tersebut, Bank Indonesia berupaya mendorong peningkatan pembiayaan UMKM melalui kenaikan insentif Likuiditas Makroprudensial dari 5,5% menjadi 6% dari Dana Pihak Ketiga serta penerapan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial mulai Oktober 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM dan kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memperoleh akses pembiayaan. Namun demikian, kebijakan pembiayaan tersebut akan lebih efektif apabila diikuti dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Karena itu, penguatan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, perbaikan pencatatan keuangan, perluasan akses pasar, serta penguatan hubungan UMKM dengan industri dan rantai pasok yang lebih besar. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai tambahan modal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

Perkembangan ekonomi nasional tersebut kemudian memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Di tengah ketidakpastian global dan berbagai tantangan nasional, pemerintah daerah berupaya memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan investasi, pengembangan kawasan industri, pemberdayaan UMKM, serta percepatan transformasi menuju ekonomi hijau. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa industri hijau dan energi terbarukan harus menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi karena tuntutan pasar global semakin mengarah pada kegiatan produksi yang efisien, berkelanjutan, dan rendah emisi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyiapkan insentif pajak bagi kawasan industri yang menerapkan prinsip industri hijau dan energi terbarukan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Upaya pendampingan terhadap 1.000 industri kecil dan menengah agar bertransformasi menuju industri hijau hingga 2027 juga menunjukkan bahwa agenda keberlanjutan tidak hanya ditujukan bagi industri besar, tetapi mulai diarahkan kepada pelaku usaha yang lebih kecil.

Selain mendorong transformasi industri, Jawa Tengah juga berupaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah dan peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha. Pemerintah daerah membuka peluang bagi pelaku usaha, termasuk pengusaha perempuan, untuk mengelola dan mengembangkan potensi aset pemerintah daerah, kawasan perkebunan, serta berbagai potensi ekonomi yang ada di kabupaten dan kota. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjadikan aset dan potensi daerah sebagai sumber kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya tersebut juga diperkuat melalui program pemberdayaan UMKM, seperti Program MAPAN di Cilacap, yang menunjukkan bahwa kerja sama antara perusahaan dan masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan Tegal Business Forum 2026 diarahkan untuk menghasilkan kerja sama dan investasi yang konkret sehingga Kota Tegal dapat memperkuat perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantura Jawa Tengah.

Dengan demikian, keseluruhan berita menunjukkan adanya hubungan yang berkesinambungan antara dinamika ekonomi internasional, kondisi perekonomian Indonesia, dan strategi pembangunan Jawa Tengah. Ketegangan geopolitik, kebijakan tarif, kenaikan harga energi, inflasi, serta tingginya suku bunga global menciptakan tekanan yang kemudian memengaruhi nilai tukar rupiah, biaya impor,

kondisi APBN, pasar keuangan, dan pembiayaan dunia usaha di Indonesia. Tekanan tersebut selanjutnya menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati, diversifikasi sumber pembiayaan, penguatan likuiditas, serta peningkatan dukungan terhadap UMKM. Pada tingkat Jawa Tengah, tantangan tersebut direspons dengan memperkuat investasi, mengembangkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan daya saing industri, memperluas pemberdayaan UMKM, serta mendorong transformasi menuju industri hijau dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesimpulan utama dari seluruh perkembangan tersebut adalah bahwa meskipun perekonomian global dan nasional sedang menghadapi tekanan yang kompleks, peluang pertumbuhan tetap terbuka apabila stabilitas ekonomi dapat dijaga dan kebijakan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadapi tekanan eksternal, tetapi juga oleh kemampuan memperkuat sektor riil, meningkatkan daya saing industri dan UMKM, memperluas investasi, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## Ringkasan

- Kebijakan tarif impor Amerika Serikat menunjukkan semakin kuatnya kecenderungan proteksionisme dalam perdagangan global, karena pemerintah AS kembali menggunakan tarif sebagai instrumen untuk menekan negara mitra dagang dan menangani isu yang berkaitan dengan rantai pasok. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya perdagangan internasional dan menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan yang memiliki jaringan produksi lintas negara.
- Penolakan sejumlah negara Asia terhadap kebijakan tarif AS menunjukkan adanya potensi perubahan dalam pola hubungan perdagangan internasional, karena negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Jepang mulai memiliki kepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan di antara mereka sendiri. Langkah tersebut dapat menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar utama sekaligus menghadapi ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat.
- Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS berpotensi memengaruhi keputusan investasi perusahaan internasional, terutama perusahaan yang mengandalkan rantai pasok global. Apabila tarif impor terus meningkat, perusahaan dapat menghadapi kenaikan biaya produksi dan distribusi sehingga berpotensi melakukan penyesuaian terhadap lokasi produksi, sumber bahan baku, dan tujuan pasar.
- Kenaikan inflasi di Jepang menunjukkan bahwa tekanan harga masih menjadi persoalan penting bagi negara maju, meskipun inflasi inti masih berada di bawah target Bank of Japan sebesar 2%. Kenaikan harga produsen yang cukup tinggi menunjukkan bahwa tekanan biaya pada tingkat perusahaan masih besar dan berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.
- Pelemahan yen semakin memperbesar tekanan inflasi di Jepang karena biaya impor energi dan pangan menjadi lebih mahal, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat konflik geopolitik. Kondisi tersebut menempatkan Bank of Japan pada posisi yang sulit karena harus menjaga stabilitas harga tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Kenaikan harga minyak dunia hingga mendekati atau menembus US\$100 per barel menjadi salah satu risiko terbesar bagi perekonomian global, karena energi merupakan komponen penting dalam biaya produksi, transportasi, dan distribusi. Dengan demikian, kenaikan harga minyak dapat menciptakan tekanan inflasi yang meluas dan meningkatkan biaya hidup masyarakat di berbagai negara.
- Konflik geopolitik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada keamanan dan stabilitas politik, tetapi juga memengaruhi pasar energi dan perekonomian global, terutama karena

ketegangan di kawasan tersebut dapat mengganggu jalur transportasi dan pasokan minyak. Dampaknya kemudian dapat menyebar ke berbagai negara melalui kenaikan harga energi dan meningkatnya biaya perdagangan.

- Bank sentral negara-negara maju menghadapi tantangan untuk menentukan arah kebijakan moneter di tengah meningkatnya risiko inflasi, karena kenaikan harga energi dapat membuat inflasi kembali meningkat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan suku bunga bertahan tinggi lebih lama sehingga biaya pinjaman bagi dunia usaha dan masyarakat tetap berada pada level yang tinggi.
- Peningkatan impor emas China menunjukkan bahwa investor dan masyarakat masih membutuhkan aset perlindungan di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama ketika risiko geopolitik, inflasi, dan perubahan harga komoditas masih tinggi. Emas dipandang sebagai instrumen yang dapat membantu menjaga nilai kekayaan ketika pasar keuangan mengalami ketidakpastian.
- Tingginya permintaan emas di China juga menunjukkan adanya perubahan strategi investasi masyarakat dan institusi keuangan, karena emas tidak hanya dibeli dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui instrumen investasi berbasis emas seperti ETF. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap aset lindung nilai masih kuat meskipun kondisi ekonomi global terus berubah.
- Secara keseluruhan, perekonomian internasional menghadapi tekanan yang berasal dari berbagai arah secara bersamaan, yaitu meningkatnya proteksionisme perdagangan, konflik geopolitik, kenaikan harga minyak, inflasi, serta tingginya suku bunga. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat prospek ekonomi global masih penuh ketidakpastian dan memaksa setiap negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestiknya.
- Tekanan global terhadap harga energi dan nilai tukar memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, terutama karena Indonesia masih membutuhkan impor energi. Ketika harga minyak dunia meningkat dan rupiah melemah, biaya impor menjadi lebih mahal sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan devisa dan harga barang di dalam negeri.
- Pelemahan rupiah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS menunjukkan bahwa tekanan eksternal terhadap mata uang Indonesia masih cukup kuat, terutama akibat tingginya harga minyak dan ketidakpastian pasar keuangan global. Investor juga cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di negara berkembang ketika suku bunga negara maju masih tinggi.
- Cadangan devisa Indonesia menjadi salah satu faktor penting yang membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional, karena cadangan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran internasional dan membantu menjaga kepercayaan pasar. Dengan cadangan devisa yang relatif kuat, Indonesia memiliki ruang untuk menghadapi tekanan eksternal meskipun tetap harus menjaga kehati-hatian dalam mengelola perekonomian.
- Kenaikan harga minyak dunia meningkatkan tekanan terhadap APBN karena pemerintah harus menanggung tambahan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, sehingga ruang fiskal untuk membiayai program lainnya menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengelolaan anggaran secara hati-hati agar kenaikan beban energi tidak mengganggu program prioritas nasional.
- Proyeksi defisit APBN yang meningkat menjadi 2,85% dari PDB menunjukkan bahwa kenaikan harga energi memberikan dampak cukup besar terhadap kondisi fiskal, meskipun defisit tersebut masih berada di bawah batas 3% dari PDB. Pemerintah tetap berupaya menjaga agar kondisi fiskal tidak mengalami tekanan yang berlebihan dan tetap memiliki kredibilitas di mata investor.
- Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan program stimulus ekonomi meskipun menghadapi peningkatan beban subsidi energi, karena stimulus tetap dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya

upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan menjaga pertumbuhan dengan keharusan mempertahankan disiplin fiskal.

- Penerbitan Panda Bond menunjukkan strategi Indonesia untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan negara, sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada pasar obligasi yang menggunakan dolar AS. Diversifikasi tersebut dapat membantu memperluas basis investor dan membuka akses terhadap sumber pembiayaan dari pasar keuangan yang berbeda.
- Tingginya permintaan investor terhadap Panda Bond menunjukkan bahwa surat utang Indonesia masih memiliki daya tarik di pasar internasional, meskipun kondisi ekonomi global sedang menghadapi berbagai tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa investor masih menilai Indonesia memiliki fundamental dan prospek ekonomi yang cukup menarik.
- Pemerintah juga berupaya mengelola persoalan pembiayaan proyek Whoosh agar tidak memberikan tekanan yang terlalu besar terhadap APBN, salah satunya melalui penyusunan skema pembiayaan khusus. Langkah tersebut diperlukan agar kewajiban proyek dapat diselesaikan tanpa mengurangi ruang anggaran bagi pembangunan dan program pemerintah lainnya.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan meskipun menghadapi tekanan eksternal, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61% dan proyeksi pertumbuhan kuartal II sekitar 5,4%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih berjalan dan konsumsi, investasi, serta kegiatan usaha masih menjadi penopang pertumbuhan.
- Namun, pertumbuhan ekonomi yang masih positif belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh sektor ekonomi, terutama sektor UMKM yang menghadapi perlambatan pertumbuhan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kemampuan sebagian pelaku usaha kecil untuk mengakses modal dan memperluas kegiatan usahanya.
- Kredit UMKM yang hanya tumbuh sekitar 1% menunjukkan bahwa pembiayaan kepada sektor usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan, sementara pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan jauh lebih tinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas perbankan belum secara otomatis meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.
- Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan kredit UMKM adalah melemahnya daya beli masyarakat, karena penurunan konsumsi dapat mengurangi omzet dan kemampuan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi. Dalam kondisi tersebut, pelaku UMKM cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman karena khawatir tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran.
- Perubahan pola konsumsi masyarakat menuju platform digital juga memengaruhi perkembangan UMKM, karena pelaku usaha yang belum mampu mengikuti perubahan teknologi dan pemasaran digital dapat kehilangan akses terhadap konsumen. Oleh sebab itu, digitalisasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi UMKM untuk mempertahankan dan memperluas pasar.
- Masih terbatasnya literasi keuangan menjadi salah satu kendala struktural bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan perbankan, karena sebagian pelaku usaha belum memiliki pencatatan keuangan dan laporan usaha yang memadai. Kondisi tersebut membuat bank lebih sulit menilai kemampuan usaha dan risiko kredit calon debitur.
- Penguatan UMKM tidak dapat dilakukan hanya melalui penyaluran kredit, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, literasi digital, keamanan transaksi digital, serta kemampuan memasarkan produk. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan dapat digunakan secara lebih produktif dan meningkatkan kemampuan usaha untuk berkembang.
- Kebijakan Bank Indonesia untuk meningkatkan insentif likuiditas bagi perbankan diharapkan dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit UMKM, karena bank memperoleh insentif

ketika menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kemampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan pembiayaan dan memiliki prospek usaha yang layak.

- Penguatan pembiayaan UMKM membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, kementerian, perusahaan besar, hingga pelaku usaha sendiri. Kerja sama tersebut diperlukan agar persoalan UMKM dapat ditangani secara menyeluruh mulai dari permodalan, produksi, pemasaran, legalitas, digitalisasi, hingga akses terhadap rantai pasok.
- Jawa Tengah menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif kuat dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 sebesar 5,89%, sehingga daerah tersebut memiliki dasar yang cukup baik untuk terus mengembangkan investasi dan kegiatan ekonomi. Namun, capaian pertumbuhan tersebut perlu dipertahankan melalui kebijakan yang mampu mendorong produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.
- Penguatan investasi menjadi salah satu strategi utama Jawa Tengah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi investor.
- Pemerintah Jawa Tengah juga berupaya mengembangkan potensi daerah melalui kerja sama dengan organisasi pengusaha dan pelaku usaha, termasuk dalam pengembangan aset daerah dan potensi ekonomi di berbagai kabupaten dan kota. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah.
- Pemberdayaan pengusaha perempuan menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas basis pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, karena perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM dan kegiatan ekonomi lokal. Penguatan jaringan bisnis, peningkatan permodalan, pemasaran, digitalisasi, serta akses ekspor dapat membantu meningkatkan skala usaha mereka.
- Transformasi menuju industri hijau menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah, karena tuntutan pasar global semakin mengarah pada produk yang dihasilkan melalui proses produksi yang ramah lingkungan. Industri yang mampu mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dalam rantai pasok global.
- Pemerintah Jawa Tengah menyiapkan insentif pajak bagi kawasan industri dan perusahaan yang menerapkan prinsip industri hijau serta energi terbarukan, sehingga kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan upaya menarik investasi. Dengan adanya insentif tersebut, perusahaan diharapkan memiliki dorongan lebih besar untuk melakukan transformasi teknologi dan meningkatkan efisiensi produksi.
- Pendampingan terhadap 1.000 industri kecil dan menengah untuk bertransformasi menuju industri hijau hingga 2027 menunjukkan bahwa agenda keberlanjutan mulai menysasar sektor usaha yang lebih luas, tidak hanya perusahaan besar. Langkah ini penting karena industri kecil dan menengah juga memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi daerah.
- Tegal Business Forum 2026 menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kerja sama investasi yang nyata. Forum tersebut tidak hanya menjadi kegiatan promosi, tetapi diarahkan untuk mendorong munculnya proyek dan kegiatan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi langsung.
- Investasi di Kota Tegal diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, sehingga mampu membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan berkembangnya investasi, kegiatan ekonomi lokal diharapkan semakin aktif dan dapat memperkuat posisi Kota Tegal sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Pantura Jawa Tengah.

- Program pemberdayaan UMKM di Cilacap melalui Program MAPAN menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas usaha selain bantuan permodalan, karena pelaku usaha juga perlu memiliki legalitas dan kemasan produk yang baik. Legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas.
- Peningkatan kualitas kemasan menjadi penting bagi UMKM karena kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai sarana pemasaran, terutama ketika produk ingin masuk ke pasar modern atau memperluas pemasaran melalui platform digital. Dengan kemasan yang lebih baik, produk lokal dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi.
- Program pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui kerja sama perusahaan dan masyarakat menunjukkan pentingnya peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung ekonomi lokal, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan penguatan usaha masyarakat. Program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
- Secara keseluruhan, Jawa Tengah berupaya membangun perekonomian yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan dan pemerataan, melalui kombinasi antara peningkatan investasi, penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat, digitalisasi, dan transformasi industri hijau.

## Implikasi

- Penerapan tarif impor baru oleh Amerika Serikat berimplikasi pada meningkatnya ketidakpastian perdagangan global, karena kebijakan tersebut dapat meningkatkan biaya perdagangan, mengganggu rantai pasok internasional, dan mendorong negara-negara mitra dagang AS untuk memperkuat hubungan ekonomi satu sama lain guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat.
- Kenaikan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah berimplikasi pada meningkatnya tekanan inflasi global, karena kenaikan biaya energi dapat meningkatkan biaya produksi, transportasi, dan distribusi berbagai barang. Kondisi tersebut juga dapat memaksa bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama untuk mengendalikan inflasi.
- Meningkatnya inflasi Jepang dan pelemahan yen berimplikasi pada semakin besarnya tekanan terhadap biaya impor energi dan pangan, sehingga Bank of Japan menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Jika tekanan harga terus meningkat, peluang pengetatan kebijakan moneter juga semakin besar.
- Meningkatnya impor emas China menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi dan geopolitik mendorong investor mencari aset lindung nilai, sehingga emas semakin banyak digunakan untuk melindungi nilai kekayaan dari risiko inflasi, pelemahan mata uang, dan gejolak pasar keuangan global.
- Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah berimplikasi pada meningkatnya biaya impor energi serta risiko imported inflation, sehingga tekanan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat dapat meningkat apabila kenaikan biaya tersebut diteruskan ke konsumen.
- Meningkatnya harga energi berimplikasi pada bertambahnya beban APBN, karena pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Kondisi ini menyebabkan defisit APBN meningkat hingga mendekati batas 3% dari PDB dan dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas lainnya.
- Tekanan global dan tingginya suku bunga negara maju berimplikasi pada meningkatnya risiko volatilitas arus modal dan nilai tukar rupiah, sehingga pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat cadangan devisa, serta mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

- Penerbitan Panda Bond berimplikasi pada semakin beragamnya sumber pembiayaan pemerintah, karena Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar utang berbasis dolar AS. Diversifikasi tersebut dapat memperluas basis investor dan mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu pasar keuangan.
- Rendahnya pertumbuhan kredit UMKM berimplikasi pada terbatasnya kemampuan sektor usaha kecil untuk berkembang, meskipun UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas perbankan belum otomatis meningkatkan akses pembiayaan UMKM.
- Rendahnya literasi keuangan, lemahnya pencatatan usaha, dan melemahnya daya beli masyarakat menjadi hambatan utama bagi perkembangan UMKM, sehingga penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui penambahan kredit, tetapi juga membutuhkan peningkatan kemampuan manajemen, literasi keuangan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar.
- Peningkatan insentif likuiditas Bank Indonesia bagi perbankan berimplikasi pada terbukanya peluang peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan UMKM memenuhi persyaratan pembiayaan dan adanya dukungan dari pemerintah, perbankan, regulator, serta lembaga terkait lainnya.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif kuat berimplikasi pada terbukanya peluang untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi pertumbuhan tersebut perlu terus didukung melalui penguatan sektor usaha, peningkatan produktivitas, dan perbaikan iklim investasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.
- Pengembangan industri hijau dan energi terbarukan berimplikasi pada meningkatnya daya saing Jawa Tengah dalam menghadapi tuntutan pasar global, karena industri yang mampu menerapkan proses produksi ramah lingkungan akan lebih siap menghadapi perubahan standar perdagangan dan kebutuhan investasi berkelanjutan.
- Pemberian insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip industri hijau serta pendampingan terhadap industri kecil dan menengah berimplikasi pada peluang peningkatan efisiensi dan daya saing industri daerah, meskipun proses transformasi tersebut membutuhkan dukungan teknologi, pengetahuan, dan pendampingan yang berkelanjutan.
- Penguatan investasi melalui forum bisnis dan kerja sama antara pemerintah, investor, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya peluang penciptaan lapangan kerja serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, khususnya apabila investasi yang masuk diarahkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki keterkaitan dengan ekonomi lokal.
- Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan legalitas usaha, kualitas kemasan, digitalisasi, dan akses pasar berimplikasi pada meningkatnya peluang produk lokal untuk berkembang dan bersaing, karena UMKM tidak hanya memperoleh dukungan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke pasar modern dan memperluas jaringan pemasaran.
- Secara keseluruhan, rangkaian berita menunjukkan bahwa tekanan global berupa konflik geopolitik, kenaikan harga energi, inflasi, dan ketidakpastian perdagangan dapat berdampak hingga ke Indonesia dan Jawa Tengah, sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi melalui penguatan stabilitas ekonomi, pengelolaan fiskal yang hati-hati, peningkatan akses pembiayaan UMKM, penguatan investasi, serta pengembangan industri hijau agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

# Berita Sabtu 25 Juli

## Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan berita ekonomi internasional, nasional, dan Jawa Tengah yang dimuat pada Sabtu, 25 Juli 2026, dapat disimpulkan bahwa perekonomian global sedang berada dalam situasi yang penuh tekanan akibat meningkatnya kebijakan proteksionisme perdagangan Amerika Serikat. Penerapan tarif impor baru sebesar 10% hingga 12,5% terhadap sekitar 60 negara menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan AS semakin berpengaruh terhadap arus perdagangan global. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari China karena dinilai sebagai tarif sepihak yang berpotensi memperburuk hubungan ekonomi internasional, sementara negara-negara lain seperti Meksiko dan India memilih pendekatan yang lebih hati-hati melalui negosiasi dan pemanfaatan perjanjian perdagangan. Meksiko bahkan menolak melakukan tarif balasan karena menyadari bahwa eskalasi perang dagang dapat semakin merugikan perekonomian, sedangkan perlindungan melalui USMCA membuat sebagian besar eksportnya tetap terlindungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia kini berupaya mencari keseimbangan antara mempertahankan akses pasar Amerika Serikat dan menghindari konflik perdagangan yang lebih luas.

Dampak kebijakan tarif tersebut juga mulai terlihat secara nyata pada sektor-sektor ekonomi di berbagai negara. India tetap memilih melanjutkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat meskipun sebagian eksportnya dikenai tarif 10%, dengan sejumlah produk strategis seperti obat generik, ponsel pintar, baja, aluminium, dan suku cadang otomotif memperoleh pengecualian. Sementara itu, industri keju Gruyere di Swiss mengalami penurunan penjualan akibat kenaikan tarif AS hingga 12,5%, sehingga produsen harus mengurangi produksi sebesar 5% untuk mencegah penumpukan stok dan menjaga harga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tarif perdagangan tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga langsung memengaruhi produsen, petani, eksportir, harga barang, dan keberlangsungan pasar. Dengan demikian, ketegangan perdagangan global berpotensi menimbulkan perubahan pada rantai pasok, pola perdagangan, serta strategi produksi berbagai negara.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan global, China justru berupaya memperkuat daya tarik ekonominya melalui transformasi Pulau Hainan menjadi kawasan perdagangan bebas khusus. Investasi yang mencapai sekitar US\$113 miliar atau setara Rp2.011 triliun menunjukkan besarnya ambisi China untuk menciptakan pusat perdagangan dan investasi baru yang mampu memperkuat keterbukaan ekonominya. Peningkatan proporsi barang yang dapat masuk tanpa tarif, perluasan kategori barang bebas bea, serta kemudahan bagi investasi asing diharapkan mampu mempercepat integrasi rantai pasok dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara. Langkah ini menunjukkan bahwa ketika sebagian negara meningkatkan hambatan perdagangan, China berusaha membangun model liberalisasi yang lebih terkelola untuk menarik modal dan memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional. Perkembangan tersebut sekaligus membuka peluang baru bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk memperluas hubungan ekonomi dan investasi dengan China.

Pengaruh gejolak global tersebut kemudian terasa pada perekonomian Indonesia, terutama melalui pasar keuangan dan perdagangan. IHSG mengalami tekanan dan menutup perdagangan pada level 6.196,43 setelah melemah secara harian, meskipun secara mingguan penurunannya relatif tipis. Investor menjadi lebih selektif karena harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat, penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi global, potensi suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama, hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah mendekati US\$100 per barel. Di sisi lain, stabilitas rupiah setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 5,75% menjadi salah satu faktor yang membantu menahan tekanan terhadap pasar domestik. Dengan demikian, arah pasar keuangan Indonesia ke depan sangat bergantung

pada perkembangan kebijakan global, keputusan bank sentral, harga komoditas, kondisi geopolitik, serta kinerja laporan keuangan perusahaan dalam negeri.

Dalam menghadapi tekanan perdagangan global, Indonesia berusaha memperkuat hubungan ekonomi dengan China melalui perluasan kerja sama yang tidak lagi terbatas pada perdagangan dan investasi konvensional, tetapi juga mencakup kecerdasan buatan, semikonduktor, ekonomi digital, pendidikan, otomotif, jaringan serat optik, dan pusat data. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-China yang mencapai sekitar US\$154 miliar hingga US\$160 miliar pada 2025 menunjukkan besarnya arti hubungan kedua negara bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal untuk mendorong investasi bernilai tambah tinggi. Kerja sama ini menjadi semakin strategis karena Indonesia perlu melakukan diversifikasi hubungan ekonomi dan pasar di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia berupaya memanfaatkan hubungan dengan China untuk mempercepat transformasi industri dan digital sekaligus memperkuat posisi dalam rantai pasok global.

Namun, Indonesia tetap menghadapi tantangan serius dalam menjaga daya saing ekspor dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Tarif baru Amerika Serikat sebesar 10% terhadap Indonesia masih diberlakukan, meskipun sejumlah produk, khususnya produk padat karya dan tekstil tertentu, memperoleh pengecualian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pemerintah Indonesia masih melakukan lobi dan konsultasi dengan pihak Amerika Serikat terkait investigasi mengenai praktik kerja paksa dan kelebihan kapasitas industri. Untuk mengurangi dampak tarif, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi impor bahan baku, menekan biaya produksi, mengoptimalkan berbagai perjanjian perdagangan, serta membuka pasar alternatif di luar Amerika Serikat. Di sisi lain, pelanggaran aturan Devisa Hasil Ekspor sumber daya alam bagi eksportir yang berhubungan dengan Amerika Serikat, China, Kanada, dan Australia menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga hubungan bilateral, menarik investasi, dan mempertahankan fleksibilitas dunia usaha tanpa mengabaikan kebutuhan memperkuat likuiditas dalam negeri.

Kondisi ekonomi domestik juga menunjukkan adanya perkembangan positif sekaligus tantangan struktural. Perum Bulog telah menyerap 3,5 juta ton setara beras hasil panen dalam negeri atau sekitar 87% dari target 4 juta ton, sehingga Indonesia dinilai berada pada jalur yang semakin kuat menuju swasembada pangan berkelanjutan. Penyerapan tersebut tidak hanya memperkuat Cadangan Beras Pemerintah, tetapi juga berfungsi menjaga harga gabah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pada sektor UMKM, Bank Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan kredit melalui peningkatan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial dari 5,5% menjadi 6% Dana Pihak Ketiga serta penerapan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial mulai Oktober 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, meskipun pertumbuhan kredit UMKM masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan perlu disertai penguatan manajemen, digitalisasi, kapasitas usaha, dan akses pasar UMKM.

Meskipun pemerintah tetap optimistis terhadap perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan kuartal I yang mencapai 5,61% karena tidak adanya faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan kuartal II berada di sekitar 5,4% atau sedikit lebih tinggi, sementara optimisme tetap diarahkan pada penguatan ekonomi pada semester II melalui kecukupan likuiditas dan kebijakan fiskal yang prudent. Akan tetapi, persoalan ketenagakerjaan menunjukkan adanya tekanan yang perlu mendapat perhatian serius. Sebanyak 32.389 pekerja tercatat terkena PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026, sementara PMI manufaktur berada di zona kontraksi 46,9 dan biaya input mengalami kenaikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih relatif baik belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas lapangan kerja, sehingga pemerintah perlu tidak hanya menangani dampak PHK, tetapi juga mengatasi akar masalah berupa lemahnya

permintaan, tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, dan tekanan terhadap industri padat karya.

Permasalahan nasional tersebut kemudian terlihat secara nyata di Jawa Tengah, khususnya melalui tekanan terhadap industri garmen dan tekstil di Semarang. PT Victory Apparel di kawasan Tanjung Mas harus menghentikan operasional setelah hampir satu tahun tidak berproduksi akibat hilangnya pesanan dari buyer, sehingga lebih dari 800 pekerja terdampak PHK. Sekitar 150 di antaranya diperkirakan merupakan warga Kota Semarang, sementara sebagian besar lainnya berasal dari Kabupaten Demak. Kasus ini memperlihatkan bagaimana perlambatan ekonomi global dan melemahnya permintaan ekspor dapat berdampak langsung pada industri daerah dan kehidupan masyarakat pekerja. Pemerintah daerah berupaya membantu melalui akses pelatihan di Balai Latihan Kerja, koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta harapan adanya bantuan langsung tunai bagi korban PHK. Selain itu, penguatan Pelabuhan Tanjung Emas juga dinilai penting untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing industri Jawa Tengah.

Di sisi lain, Jawa Tengah juga menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM perempuan dan modernisasi infrastruktur logistik. Pameran “Iwapi Berkarya Ekonomi Jaya” memperlihatkan perkembangan usaha perempuan dari 30 kabupaten/kota melalui produk kriya, fesyen, dan kuliner, sekaligus menegaskan pentingnya kekompakan organisasi dalam memperluas peluang usaha dan lapangan kerja. Pada sektor logistik, investasi Rp30,7 miliar di Terminal Petikemas Semarang digunakan untuk menguji coba RTG listrik pertama sebagai bagian dari elektrifikasi tiga unit alat bongkar muat. Penggunaan teknologi listrik, sistem kendali berbasis GPS, dan sistem pencegah tabrakan menunjukkan arah transformasi menuju pelabuhan yang lebih efisien, aman, modern, dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, rangkaian berita tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dari tingkat global hingga Jawa Tengah sedang menghadapi tekanan besar akibat proteksionisme perdagangan, perlambatan permintaan, ketegangan geopolitik, dan tantangan industri, tetapi pada saat yang sama masih memiliki peluang melalui diversifikasi pasar, penguatan pangan, pengembangan UMKM, investasi teknologi, transformasi digital, dan modernisasi infrastruktur. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat daya saing, melindungi tenaga kerja, memperluas pasar, mengendalikan biaya produksi, serta membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

## Ringkasan

- Kebijakan tarif baru Amerika Serikat menjadi isu utama yang memengaruhi perekonomian global, setelah pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 10% hingga 12,5% terhadap sekitar 60 negara mitra dagang dengan alasan negara-negara tersebut dinilai belum cukup kuat mencegah masuknya produk yang dibuat menggunakan tenaga kerja paksa. Kebijakan ini mendapat penolakan dari China yang menilai tarif sepihak dan perang dagang tidak menguntungkan pihak mana pun, sementara China sendiri dikenai tarif 12,5% di luar tarif yang telah berlaku sebelumnya. Kebijakan tersebut juga menyasar sejumlah negara besar seperti Jepang, Uni Eropa, Australia, Indonesia, Filipina, Swiss, Taiwan, dan Thailand, sehingga berpotensi memengaruhi arus perdagangan dan rantai pasok global.
- Meksiko memilih tidak membalas tarif Amerika Serikat dan lebih mengandalkan perjanjian perdagangan USMCA untuk melindungi kepentingan ekonominya. Pemerintah Meksiko menilai bahwa pemberlakuan tarif balasan justru dapat memicu peningkatan tarif yang lebih tinggi dan memperbesar konflik dengan ekonomi terbesar dunia. Meskipun Meksiko dikenai tarif 10% terhadap ekspor yang berada di luar cakupan perjanjian, sekitar 80% hingga 85% ekspor Meksiko tetap terlindungi atau tidak dikenai tarif berkat ketentuan USMCA, sehingga pemerintah Meksiko berusaha mempertahankan keunggulan tersebut dibandingkan negara-negara lain yang juga menjadi sasaran kebijakan tarif baru AS.

- India juga memilih mempertahankan jalur negosiasi dengan Amerika Serikat meskipun sebagian eksportnya dikenai tarif 10%. Pemerintah India tetap berkomitmen menyelesaikan perjanjian perdagangan bilateral dengan AS dan melanjutkan pembahasan mengenai sejumlah sektor, termasuk tekstil. Tarif baru tersebut lebih rendah dibandingkan tarif 12,5% yang sebelumnya diusulkan, sementara produk seperti obat generik, ponsel pintar, baja, aluminium, dan suku cadang otomotif tidak termasuk dalam cakupan tarif baru. Dengan adanya pengecualian tersebut, sekitar 45% ekspor India ke AS tetap berada di luar cakupan tarif, sedangkan sekitar 55% lainnya menghadapi bea masuk tambahan.
- Dampak kebijakan tarif AS juga dirasakan oleh industri keju Gruyere di Swiss yang mengalami penurunan penjualan dan harus menyesuaikan produksinya. Kenaikan tarif impor AS hingga 12,5% membuat produsen mengurangi produksi sekitar 5% untuk mencegah kelebihan stok dan menjaga harga tetap stabil, karena pasar Amerika Serikat secara tradisional menyumbang sekitar 13% penjualan Gruyere. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang bersifat makro dapat memberikan dampak langsung terhadap petani, produsen, pedagang, dan sektor usaha di negara lain, terutama ketika pasar AS sulit digantikan dalam waktu singkat.
- China juga berupaya memperkuat posisi ekonominya melalui pembangunan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan dengan investasi sekitar US\$113 miliar atau setara Rp2.011 triliun. Kawasan ini dirancang sebagai kawasan pabean khusus dengan pengurangan tarif, perluasan barang yang dapat masuk tanpa bea, serta kemudahan investasi dan layanan bagi entitas asing. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan ekonomi China, menarik modal asing, memperkuat integrasi rantai pasok, dan memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara. Hainan juga diposisikan sebagai pusat perdagangan baru yang dapat memperkuat daya saing China di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya hambatan perdagangan global.
- Dampak ketidakpastian global mulai terlihat pada pasar keuangan Indonesia, dengan IHSG bergerak volatil dan melemah tipis sepanjang pekan. Pada penutupan perdagangan Jumat, IHSG berada di level 6.196,43 dan mengalami tekanan akibat kebijakan tarif baru Amerika Serikat, penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi global, potensi suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah mendekati US\$100 per barel. Meskipun demikian, kinerja emiten kuartal II dan semester I-2026, terutama sektor perbankan dan konsumsi, masih menjadi faktor penopang pasar, sementara investor tetap mencermati arah kebijakan The Fed, data ekonomi AS, inflasi, nilai tukar rupiah, dan arus dana asing.
- Indonesia terus memperluas kerja sama ekonomi dengan China untuk mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan konvensional dan mempercepat transformasi ekonomi. Kerja sama tersebut mencakup perdagangan, investasi, industri, ekonomi digital, kecerdasan buatan, pendidikan, semikonduktor, jaringan serat optik, aplikasi digital, pusat data, dan industri otomotif. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan China pada 2025 mencapai sekitar US\$154 miliar hingga US\$160 miliar, sementara perusahaan China seperti BYD dan Chery terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction untuk menarik investasi bernilai tambah tinggi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok teknologi global.
- Indonesia menghadapi tarif impor baru Amerika Serikat sebesar 10%, tetapi pemerintah masih berupaya mempertahankan pengecualian bagi sejumlah produk dan memperjuangkan tarif yang lebih kompetitif. Pemerintah masih melakukan konsultasi dengan AS mengenai isu tenaga kerja paksa dan kelebihan kapasitas industri, sementara sejumlah produk padat karya dan tekstil tetap memperoleh pengecualian berdasarkan perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Untuk menjaga daya saing ekspor, pemerintah berencana menyederhanakan regulasi impor bahan

baku, menekan biaya produksi, mengoptimalkan perjanjian dagang yang telah ada, serta membuka pasar alternatif di luar Amerika Serikat.

- Ketahanan pangan nasional menunjukkan perkembangan positif setelah Bulog berhasil menyerap 3,5 juta ton setara beras dari hasil panen dalam negeri atau sekitar 87% dari target 4 juta ton. Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah dan mendukung target swasembada pangan berkelanjutan pada 2026. Bulog menegaskan bahwa penyerapan hasil panen tidak akan berhenti setelah target tercapai, karena pembelian gabah dan beras akan terus dilakukan sesuai ketersediaan produksi untuk menjaga harga di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat cadangan pangan nasional.
- Pemerintah dan Bank Indonesia berupaya memperkuat sektor UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan dan insentif perbankan. Pertumbuhan kredit UMKM pada Juni 2026 mencapai 1% secara tahunan dengan nilai Rp1.519,1 triliun, masih jauh di bawah pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan sebesar 12,6%. Oleh karena itu, BI meningkatkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial dari 5,5% menjadi 6% Dana Pihak Ketiga dan akan menerapkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial mulai Oktober 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong perbankan lebih aktif membiayai UMKM, sementara penguatan kapasitas manajemen, digitalisasi, korporatisasi, dan akses pasar juga diperlukan agar UMKM semakin layak dan mampu menyerap pembiayaan.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 diperkirakan lebih realistis dan berpotensi melambat dibandingkan kuartal I yang tumbuh 5,61% karena tidak adanya faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan kuartal II berada di sekitar 5,4% atau sedikit lebih tinggi, tetapi tetap optimistis terhadap penguatan ekonomi pada semester II melalui kecukupan likuiditas dan kebijakan fiskal yang hati-hati. Di sisi lain, tekanan terhadap dunia usaha semakin terlihat dari meningkatnya PHK, melemahnya permintaan, tingginya biaya produksi, serta PMI manufaktur yang berada di zona kontraksi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang masih relatif baik belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang sehat.
- Gelombang PHK menjadi salah satu tantangan utama perekonomian Indonesia karena sebanyak 32.389 pekerja tercatat terkena PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Tekanan terutama dirasakan oleh industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan sebagian otomotif yang menghadapi kombinasi melemahnya permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Satgas PHK dinilai penting untuk mengawal mediasi dan pemenuhan hak pekerja, tetapi dinilai belum cukup untuk mencegah PHK apabila tidak disertai kebijakan yang mampu menekan biaya energi, mempermudah akses bahan baku, menjaga perdagangan dari impor tidak sehat, dan memperluas akses terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- Pemerintah juga mengambil sejumlah kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, daya beli masyarakat, dan keberlangsungan industri hasil tembakau. Tarif cukai rokok tahun depan dipastikan tidak naik, tetapi pemerintah menyiapkan kemungkinan penambahan satu layer tarif untuk menangani persoalan rokok ilegal. Hingga Semester I-2026, penerimaan cukai mencapai Rp109,4 triliun, sementara penindakan terhadap rokok ilegal meningkat dengan penyitaan sekitar 905 juta batang. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan penerimaan negara dan stabilitas industri sambil memperketat pengawasan terhadap peredaran produk ilegal.
- Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif dalam penguatan ekonomi perempuan dan UMKM melalui pameran “Iwapi Berkarya Ekonomi Jaya” yang menampilkan produk unggulan dari 30 kabupaten/kota. Pameran tersebut memperkenalkan berbagai produk kriya, fesyen, dan kuliner sekaligus menjadi sarana promosi bagi wirausaha perempuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya persatuan dan kekompakan organisasi agar para pelaku usaha dapat berkembang

bersama, sehingga penguatan jaringan UMKM perempuan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha, mempertahankan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- Di sisi lain, Jawa Tengah juga menghadapi dampak nyata dari tekanan industri global melalui PHK besar-besaran di sektor garmen. PT Victory Apparel di kawasan Tanjung Mas, Semarang Utara, menghentikan operasional setelah hampir satu tahun tidak berproduksi akibat kehilangan pesanan dari buyer, sehingga lebih dari 800 pekerja terdampak PHK dan sekitar 150 di antaranya diperkirakan merupakan warga Kota Semarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa melemahnya permintaan global dan masalah keuangan perusahaan dapat langsung berdampak pada tenaga kerja daerah, sehingga pemerintah daerah menyediakan akses pelatihan di BLK, berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan mendorong adanya bantuan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
- Penguatan infrastruktur logistik dan transformasi energi menjadi perkembangan positif lain di Jawa Tengah, khususnya melalui investasi Rp30,7 miliar untuk menguji coba RTG Crane berbasis listrik di Terminal Petikemas Semarang. Penggunaan RTG listrik diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar diesel, menekan konsumsi energi dan emisi karbon, serta meningkatkan efisiensi dan keandalan kegiatan bongkar muat. Alat tersebut juga dilengkapi teknologi keselamatan dan sistem kendali berbasis GPS untuk meningkatkan presisi operasional dan mencegah potensi tabrakan. Modernisasi ini menjadi bagian dari konsep Green Port dan diharapkan dapat memperkuat daya saing Pelabuhan Tanjung Emas sekaligus mendukung kegiatan industri dan perdagangan Jawa Tengah yang semakin membutuhkan layanan logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

## Implikasi

- Pemberlakuan tarif impor baru Amerika Serikat terhadap sekitar 60 negara berimplikasi pada meningkatnya ketidakpastian dan fragmentasi perdagangan global. Tarif sebesar 10% hingga 12,5% dapat meningkatkan biaya masuk produk ke pasar AS, sehingga eksportir dari berbagai negara harus menyesuaikan harga, menekan biaya produksi, mencari pasar alternatif, atau melakukan negosiasi ulang dengan mitra dagang. Karena negara-negara seperti China, Jepang, Uni Eropa, Australia, dan sejumlah negara Asia termasuk dalam sasaran kebijakan, dampaknya berpotensi meluas terhadap rantai pasok dan arus perdagangan internasional.
- Penolakan China terhadap tarif sepihak AS menunjukkan bahwa hubungan ekonomi kedua negara berpotensi kembali menghadapi ketegangan perdagangan yang lebih besar. Apabila kebijakan tarif terus berkembang dan diikuti langkah balasan, maka biaya perdagangan dapat meningkat dan hubungan dagang global menjadi semakin tidak stabil. Namun, sikap China yang belum langsung mengumumkan tarif balasan juga menunjukkan adanya kemungkinan bagi kedua pihak untuk mempertahankan ruang negosiasi dan mencegah eskalasi perang dagang yang lebih luas.
- Strategi Meksiko yang memilih tidak membalas tarif AS memperlihatkan pentingnya perjanjian perdagangan dalam melindungi kepentingan ekspor suatu negara. Keberadaan USMCA memungkinkan sebagian besar ekspor Meksiko tetap terlindungi dari tarif baru, sehingga negara tersebut dapat menghindari eskalasi konflik perdagangan sekaligus mempertahankan akses ke pasar Amerika Serikat. Implikasinya, negara-negara lain dapat semakin terdorong untuk memperkuat dan memanfaatkan perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral sebagai instrumen perlindungan terhadap perubahan kebijakan perdagangan sepihak.
- Keputusan India untuk tetap melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi menjadi semakin penting dalam menghadapi kebijakan tarif. Meskipun sebagian eksportnya dikenai tarif 10%, adanya pengecualian terhadap sejumlah produk strategis membuat India masih memiliki ruang untuk mempertahankan hubungan dagang dan memperjuangkan kepentingan sektor-sektor tertentu, termasuk tekstil. Kondisi ini

mengimplikasikan bahwa perundingan perdagangan dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak tarif sekaligus menjaga peluang tercapainya perjanjian perdagangan bilateral yang lebih menguntungkan.

- Dampak tarif terhadap industri keju Gruyere Swiss menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan global dapat langsung memengaruhi sektor produksi dan masyarakat di tingkat lokal. Penurunan penjualan di pasar AS mendorong produsen mengurangi produksi untuk mencegah kelebihan stok dan menjaga harga, tetapi langkah tersebut juga dapat menekan pendapatan petani, produsen, dan pedagang. Implikasi yang lebih luas adalah bahwa eksportir yang bergantung pada pasar besar seperti Amerika Serikat perlu melakukan diversifikasi pasar secara bertahap agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan tarif dan kebijakan perdagangan.
- Pembangunan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan dengan investasi sekitar US\$113 miliar atau setara Rp2.011 triliun menunjukkan upaya China memperkuat keterbukaan ekonomi dan menarik investasi asing di tengah meningkatnya proteksionisme global. Perluasan barang bebas tarif dan kemudahan investasi dapat memperkuat posisi Hainan sebagai pusat perdagangan serta mempercepat integrasi rantai pasok di Asia. Implikasinya bagi kawasan Asia Tenggara adalah munculnya peluang baru untuk memperluas perdagangan dan investasi dengan China, meskipun Hainan juga berpotensi menjadi pesaing baru bagi pusat perdagangan regional seperti Hong Kong.
- Tarif impor baru Amerika Serikat berimplikasi langsung terhadap daya saing ekspor Indonesia, terutama karena produk Indonesia menghadapi tambahan biaya ketika memasuki pasar AS. Meskipun sejumlah produk padat karya dan tekstil memperoleh pengecualian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, pemerintah tetap perlu melakukan lobi dan konsultasi untuk memperoleh perlakuan tarif yang lebih kompetitif. Dalam jangka panjang, kondisi ini mendorong Indonesia untuk menekan biaya produksi, menyederhanakan impor bahan baku, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada satu tujuan perdagangan.
- Ketidakpastian perdagangan global dan ketegangan geopolitik berimplikasi pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan Indonesia. Pelemahan IHSG dan meningkatnya kewaspadaan investor menunjukkan bahwa kebijakan tarif AS, penguatan dolar, kenaikan imbal hasil obligasi, potensi suku bunga tinggi, serta kenaikan harga minyak dapat memengaruhi keputusan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas rupiah, inflasi, arus modal asing, kebijakan Bank Indonesia, serta kinerja emiten akan menjadi semakin penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mengurangi tekanan terhadap pasar domestik.
- Perluasan kerja sama Indonesia-China ke sektor AI, semikonduktor, pusat data, serat optik, ekonomi digital, pendidikan, dan otomotif berimplikasi pada peluang percepatan transformasi struktural ekonomi Indonesia. Kerja sama ini dapat membantu Indonesia menarik investasi pada sektor bernilai tambah tinggi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Namun, agar manfaatnya lebih besar bagi perekonomian nasional, Indonesia perlu memastikan adanya peningkatan kemampuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta keterlibatan industri domestik dalam rantai nilai investasi tersebut.
- Pencapaian penyerapan Bulog sebesar 3,5 juta ton setara beras berimplikasi positif terhadap ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Tingginya penyerapan hasil panen dapat memperkuat Cadangan Beras Pemerintah dan membantu menjaga harga gabah di tingkat petani, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh konsumen tetapi juga oleh produsen pangan. Apabila penyerapan terus dilakukan secara optimal hingga target 4 juta ton tercapai, Indonesia akan memiliki fondasi cadangan pangan yang lebih kuat untuk menghadapi gejolak harga dan gangguan pasokan.
- Kebijakan peningkatan insentif KLM dan penerapan RPIM berimplikasi pada semakin besarnya dorongan bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Dengan meningkatnya insentif likuiditas, bank memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai sektor

usaha kecil dan menengah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, rendahnya pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan tidak hanya terletak pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kemampuan UMKM dalam memenuhi kelayakan usaha, mengelola keuangan, melakukan digitalisasi, dan memperluas pasar.

- Perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor musiman dan kondisi permintaan domestik. Perkiraan pertumbuhan sekitar 5,4% dibandingkan 5,61% pada kuartal I mengindikasikan perlunya penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, terutama investasi, konsumsi, ekspor, dan aktivitas produksi. Kecukupan likuiditas yang dijanjikan pemerintah dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi, tetapi kebijakan tersebut perlu berjalan bersamaan dengan penguatan daya beli dan perbaikan kondisi dunia usaha.
- Meningkatnya PHK dan kontraksi PMI manufaktur berimplikasi pada melemahnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya risiko sosial-ekonomi. Tekanan yang dihadapi industri padat karya dapat mengurangi pendapatan rumah tangga, menekan konsumsi, meningkatkan kebutuhan terhadap jaminan sosial, dan dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar apabila pekerja kehilangan sumber pendapatan. Oleh karena itu, keberadaan Satgas PHK perlu dilengkapi dengan kebijakan yang menyentuh akar persoalan industri, seperti penyediaan energi yang memadai, kemudahan bahan baku, perlindungan dari praktik impor tidak sehat, dan perluasan akses Jaminan Kehilangan Pekerja.
- Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan berimplikasi pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas industri hasil tembakau. Namun, penambahan layer tarif dan peningkatan pengawasan terhadap rokok ilegal menunjukkan bahwa pemerintah tetap berusaha menjaga penerimaan negara dan mengurangi kebocoran akibat peredaran produk ilegal. Dengan demikian, kebijakan tersebut mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara penerimaan negara, keberlangsungan industri, daya beli masyarakat, dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal.
- Pameran produk UMKM perempuan melalui kegiatan Iwapi Berkarya berimplikasi pada semakin terbukanya peluang promosi, perluasan pasar, dan penguatan jaringan usaha perempuan di Jawa Tengah. Keikutsertaan pelaku usaha dari 30 kabupaten/kota menunjukkan bahwa UMKM perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi daerah. Apabila kegiatan promosi dan pembinaan terus dilakukan secara konsisten, maka UMKM dapat berkembang lebih kuat, meningkatkan omzet, mempertahankan tenaga kerja, dan menciptakan peluang usaha baru di berbagai wilayah Jawa Tengah.
- PHK lebih dari 800 pekerja di PT Victory Apparel menunjukkan bahwa tekanan ekonomi global dan melemahnya pesanan ekspor memiliki dampak langsung terhadap industri manufaktur Jawa Tengah. Penutupan operasional perusahaan dapat menurunkan pendapatan ratusan rumah tangga, meningkatkan kebutuhan terhadap pelatihan dan perlindungan sosial, serta berpotensi menekan konsumsi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, penyediaan pelatihan melalui BLK dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting, tetapi upaya tersebut perlu disertai strategi yang lebih luas untuk menarik investasi baru dan memperkuat industri padat karya agar pekerja yang terdampak dapat kembali memperoleh kesempatan kerja.
- Kasus PHK di sektor garmen juga berimplikasi pada perlunya peningkatan daya saing industri dan efisiensi logistik Jawa Tengah. Hilangnya pesanan dari buyer menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menghadapi persoalan permintaan, tetapi juga harus mampu bersaing dalam biaya produksi dan distribusi. Karena itu, penguatan fungsi Pelabuhan Tanjung Emas dan penurunan biaya logistik menjadi penting agar produk industri Jawa Tengah lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

- Investasi Rp30,7 miliar untuk elektrifikasi RTG di Terminal Petikemas Semarang berimplikasi pada peningkatan efisiensi dan modernisasi sektor logistik Jawa Tengah. Penggunaan RTG berbasis listrik dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar diesel, menekan emisi karbon, dan berpotensi menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. Selain itu, penerapan teknologi AGSS dan ACS dapat meningkatkan keselamatan serta presisi kegiatan bongkar muat, sehingga modernisasi ini dapat memperkuat daya saing Pelabuhan Tanjung Emas sebagai bagian dari infrastruktur perdagangan dan industri regional.
- Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan adanya dua kondisi yang berjalan bersamaan, yaitu tekanan terhadap industri padat karya dan peluang pertumbuhan melalui UMKM serta transformasi infrastruktur. PHK di sektor garmen menunjukkan dampak nyata dari melemahnya permintaan global, sedangkan penguatan UMKM perempuan dan elektrifikasi pelabuhan memperlihatkan peluang untuk membangun sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Jawa Tengah perlu diarahkan untuk menghubungkan penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penarikan investasi baru, efisiensi logistik, serta pengembangan industri yang lebih modern dan ramah lingkungan agar perekonomian daerah tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global.

## **Berita Minggu 26 Juli**

### **Kesimpulan**

Secara umum, rangkaian berita ekonomi pada Minggu, 26 Juli 2026 menunjukkan bahwa perekonomian global masih berada dalam kondisi penuh ketidakpastian akibat meningkatnya proteksionisme perdagangan, ketegangan geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter, serta gejolak harga energi. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali memperkuat tembok tarif melalui penerapan tarif impor sebesar 10% hingga 12,5% terhadap sekitar 60 negara menandai bahwa perang dagang global memasuki babak baru yang lebih permanen dan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah besarnya utang publik AS. Namun, kebijakan ini tetap berpotensi meningkatkan biaya impor, menekan rumah tangga dan dunia usaha, serta mengganggu sistem perdagangan global karena negara-negara mitra dagang harus menghadapi ketidakpastian baru dalam mempertahankan akses ke pasar Amerika Serikat.

Dampak kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut kemudian meluas ke hubungan dagang dengan berbagai negara, termasuk Australia yang menyatakan keberatan langsung kepada Presiden Trump karena menilai tarif 12,5% dengan alasan penanganan kerja paksa tidak dapat dibenarkan. Keberatan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan perdagangan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan ketegangan bahkan dengan negara-negara mitra strategisnya sendiri. Pada saat yang sama, konflik yang melibatkan Iran dan risiko terganggunya kembali jalur perdagangan di Selat Hormuz memperbesar tekanan terhadap perekonomian dunia karena dapat mempertahankan tingginya harga energi dan mengancam pasokan bahan bakar. Dengan demikian, perekonomian global menghadapi dua tekanan yang saling memperkuat, yaitu meningkatnya hambatan perdagangan akibat kebijakan tarif dan risiko geopolitik yang mengganggu energi serta jalur perdagangan internasional.

Ketidakpastian global tersebut turut mendorong investor internasional mengurangi eksposur di sejumlah negara berkembang dan mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman atau memiliki prospek pertumbuhan struktural, seperti pasar keuangan Amerika Serikat, infrastruktur kecerdasan buatan, semikonduktor, energi, dan komoditas bahan baku. India mengalami pembalikan arus modal yang cukup besar, sementara Indonesia juga menghadapi tekanan capital outflow yang tercermin dari kenaikan yield SBN. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi global semakin

dipengaruhi oleh kombinasi antara kebijakan The Federal Reserve, gejolak harga energi, ketegangan geopolitik, serta kecenderungan investor untuk menghindari risiko. Bagi negara berkembang, kondisi ini menyebabkan persaingan untuk menarik modal asing menjadi semakin ketat karena investor tidak hanya mempertimbangkan imbal hasil, tetapi juga stabilitas ekonomi, kredibilitas kebijakan, kualitas regulasi, serta prospek sektor strategis seperti AI dan semikonduktor.

Dalam konteks Indonesia, kondisi eksternal tersebut memberikan tekanan sekaligus membuka peluang. Di satu sisi, meningkatnya ketidakpastian global, tingginya yield obligasi Amerika Serikat, penguatan dolar, konflik geopolitik, serta kemungkinan kenaikan harga minyak dapat mendorong arus modal keluar dan menekan rupiah. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki daya tarik karena menawarkan imbal hasil yang relatif tinggi melalui SBN dan SRBI, sementara pasar saham juga berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya harga komoditas energi dan bahan baku. Oleh karena itu, prospek arus modal asing Indonesia pada periode berikutnya sangat bergantung pada keseimbangan antara daya tarik yield domestik dan kemampuan pemerintah serta Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, fiskal, serta kepercayaan investor. Ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan akhir Juli memberikan peluang bagi inflow asing untuk berlanjut, tetapi risiko pembalikan arus modal pada Agustus hingga September tetap perlu diwaspadai apabila ekspektasi kenaikan suku bunga AS kembali menguat.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia berupaya memperkuat stabilitas pasar keuangan melalui perluasan berbagai insentif moneter dan makroprudensial, termasuk pengurangan premi untuk instrumen lindung nilai swap dan DNDF bagi investor portofolio asing, serta penguatan skema Local Currency Transaction dengan negara mitra. Kebijakan ini diarahkan untuk menurunkan biaya hedging, meningkatkan pasokan valuta asing di pasar domestik, mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang, dan memperkuat stabilitas rupiah. BI juga meningkatkan kapasitas insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan serta memperluas instrumen pendalaman pasar uang. Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia tidak hanya diupayakan melalui kebijakan suku bunga, tetapi juga melalui penguatan likuiditas, pendalaman pasar keuangan, diversifikasi transaksi mata uang, serta peningkatan daya tarik aset domestik bagi investor.

Namun demikian, berita-berita mengenai DHE SDA, utang pemerintah, dan yield SBN menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental yang perlu dikelola secara hati-hati. Relaksasi penempatan devisa hasil ekspor bagi sejumlah mitra dagang utama memang dapat memberikan fleksibilitas bagi eksportir dan menjaga hubungan perdagangan, tetapi berpotensi mengurangi jumlah valuta asing yang tertahan di dalam negeri sehingga dapat melemahkan daya dukung terhadap stabilitas rupiah dan likuiditas valas domestik. Sementara itu, persoalan utang tidak cukup dinilai hanya dari rasio utang terhadap PDB, karena struktur utang, porsi utang dalam valuta asing, beban bunga, kemampuan penerimaan negara, serta penggunaan utang untuk kegiatan produktif juga sangat menentukan kesehatan fiskal. Kenaikan yield SBN hingga sekitar 7,37% memperlihatkan bahwa investor masih meminta kompensasi risiko yang tinggi akibat tekanan global, volatilitas rupiah, dan persaingan likuiditas dengan instrumen lain seperti SRBI.

Tekanan ekonomi tersebut juga mulai tercermin pada dunia usaha nasional, meskipun kondisi korporasi secara keseluruhan belum menunjukkan krisis yang luas. Pefindo mencatat meningkatnya tekanan terhadap kualitas kredit sejumlah perusahaan akibat ketidakpastian global dan domestik, terutama pada sektor yang memiliki ketergantungan terhadap transaksi valuta asing, bahan baku impor, serta kondisi geopolitik. Industri hilirisasi, transportasi, pariwisata, konstruksi, ritel, dan properti termasuk sektor yang rentan terhadap pelemahan rupiah dan meningkatnya risiko eksternal. Sebaliknya, sektor yang berorientasi ekspor, seperti minyak dan gas hulu, pertambangan emas, serta perkebunan, masih memiliki peluang memperoleh manfaat dari kondisi harga komoditas dan meningkatnya permintaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak gejolak ekonomi global terhadap Indonesia

tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada struktur biaya, sumber pendapatan, orientasi pasar, serta kemampuan masing-masing sektor menghadapi perubahan lingkungan ekonomi.

Dalam hubungan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, kebijakan tarif tambahan sebesar 10% hingga 12,5% menjadi tantangan khusus bagi industri manufaktur dan sektor padat karya, terutama tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, produk karet, dan elektronik. Meskipun posisi tarif Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, ketidakpastian mengenai penerapan akhir tarif dan kemungkinan pengecualian produk tetap dapat memengaruhi keputusan produksi, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, Indonesia perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor, memperkuat integrasi industri domestik, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta meningkatkan daya saing produk. Dengan demikian, tantangan tarif AS tidak hanya perlu dihadapi melalui negosiasi bilateral, tetapi juga melalui penguatan fundamental industri nasional agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu pasar ekspor dan mampu memanfaatkan peluang dari pasar internasional lainnya.

Pada tingkat Jawa Tengah, berbagai berita menunjukkan bahwa daerah ini tetap berupaya membangun ketahanan ekonomi melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Di Kabupaten Blora, 45 Koperasi Desa Merah Putih telah mulai beroperasi dengan legalitas usaha yang lengkap dan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, termasuk kemitraan dengan Agrinas, penyaluran LPG 3 kilogram, serta usaha toko sembako. Koperasi tersebut juga diarahkan untuk membangun kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, dan Bulog sehingga dapat menjadi bagian dari distribusi kebutuhan pokok dan input produksi masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya bergantung pada investasi besar dan kawasan industri, tetapi juga pada kemampuan membangun lembaga ekonomi desa yang dikelola secara profesional serta mampu menghubungkan potensi lokal dengan jaringan distribusi yang lebih luas.

Dengan demikian, keseluruhan berita pada 26 Juli 2026 memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara dinamika global, kebijakan nasional, dan perkembangan ekonomi daerah. Ketegangan perdagangan Amerika Serikat, konflik geopolitik, risiko kenaikan harga energi, perubahan arah kebijakan The Fed, serta pergerakan modal global memberikan tekanan langsung terhadap rupiah, pasar obligasi, fiskal, dunia usaha, dan investasi Indonesia. Namun, Indonesia masih memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan melalui daya tarik imbal hasil aset keuangan, penguatan kebijakan BI, peningkatan investasi, diversifikasi pasar, dan pemanfaatan sektor-sektor unggulan. Pada tingkat Jawa Tengah, tantangan global tersebut perlu dijawab dengan memperkuat koperasi dan ekonomi desa, memperluas investasi, meningkatkan daya saing industri, serta membangun konektivitas ekonomi antardaerah. Oleh karena itu, kesimpulan utama dari seluruh berita adalah bahwa ketahanan ekonomi pada periode mendatang sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi produktif dari tingkat nasional hingga daerah, sehingga tekanan eksternal tidak berubah menjadi krisis, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan pemerataan pertumbuhan.

## Ringkasan

- Kebijakan tarif baru Amerika Serikat kembali menjadi perhatian utama dalam perekonomian global setelah pemerintahan Donald Trump menerapkan tarif tambahan sebesar 10% hingga 12,5% terhadap sekitar 60 negara yang dinilai gagal mencegah praktik kerja paksa dalam rantai pasok. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa strategi proteksionisme perdagangan AS masih berlanjut dan mulai dibangun menjadi kebijakan jangka panjang, terutama karena pemerintah AS juga membutuhkan tambahan penerimaan di tengah utang publik yang mendekati US\$40 triliun. Meskipun tarif memberikan tambahan penerimaan negara, kebijakan ini tetap

menimbulkan kekhawatiran karena dapat meningkatkan biaya impor, membebani konsumen dan dunia usaha, serta mengganggu sistem perdagangan global.

- Australia menjadi salah satu negara yang menyampaikan keberatan langsung terhadap tarif baru Amerika Serikat tersebut, karena Perdana Menteri Anthony Albanese menilai tarif 12,5% yang dikenakan kepada Australia tidak memiliki dasar yang kuat. Australia menilai bahwa kebijakan tersebut justru dapat meningkatkan biaya bagi konsumen Amerika Serikat dan merusak hubungan perdagangan antara kedua negara. Selain persoalan tarif, Australia juga menyerukan penghentian konflik yang melibatkan Iran karena telah mendorong kenaikan harga energi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar, serta meminta agar Selat Hormuz kembali dibuka tanpa pungutan karena jalur tersebut sangat penting bagi perdagangan internasional.
- Investor global mulai mengurangi eksposur terhadap sejumlah negara berkembang karena meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, termasuk akibat tingginya yield obligasi Amerika Serikat, penguatan dolar, konflik Iran, serta kekhawatiran terhadap kebijakan perdagangan AS. Investor cenderung mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman atau memiliki prospek pertumbuhan struktural, seperti pasar saham AS, sektor infrastruktur kecerdasan buatan, semikonduktor, energi, dan komoditas bahan baku. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara emerging market harus semakin memperkuat stabilitas ekonomi, kredibilitas kebijakan, serta daya tarik aset domestik agar tetap mampu mempertahankan dan menarik modal asing.
- Pasar keuangan Indonesia masih memiliki peluang memperoleh aliran modal asing, tetapi menghadapi risiko tekanan yang meningkat pada Agustus hingga September 2026. Pasar memperkirakan The Fed mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,5%–3,75% dalam pertemuan akhir Juli, sehingga investor asing masih berpotensi menempatkan dana di SBN dan SRBI karena imbal hasil aset Indonesia cukup menarik. Namun, apabila ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed semakin kuat menjelang September, dolar AS berpotensi menguat dan mendorong terjadinya pembalikan arus modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Risiko tersebut semakin besar apabila harga minyak tetap berada di atas US\$100 per barel karena Indonesia merupakan negara net importir minyak sehingga kondisi tersebut dapat meningkatkan beban fiskal dan memperbesar perhatian investor terhadap kondisi ekonomi domestik.
- Kondisi pasar keuangan domestik masih menunjukkan perkembangan positif meskipun tekanan eksternal tetap kuat. Aliran dana asing ke SRBI dan pasar keuangan Indonesia secara year-to-date masih mencatatkan inflow, sementara IHSG pada Juli 2026 mengalami penguatan signifikan hingga menembus kisaran 6.300 setelah sebelumnya berada di sekitar 5.695 pada awal bulan. Dana asing yang masuk ke SBN dan SRBI sepanjang Juni hingga awal Juli juga mencapai sekitar Rp105 triliun, didukung oleh meningkatnya daya tarik imbal hasil aset domestik setelah kenaikan BI Rate. Selain itu, afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil oleh S&P Global Ratings turut memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.
- Namun, kenaikan yield SBN menunjukkan bahwa pasar obligasi Indonesia masih menghadapi tekanan dari faktor global dan domestik. Yield SUN tenor 10 tahun meningkat menjadi sekitar 7,37%, naik secara mingguan maupun tahunan, terutama karena kenaikan yield US Treasury, ekspektasi kebijakan The Fed yang lebih hawkish, serta volatilitas nilai tukar rupiah. Meskipun BI mempertahankan BI Rate pada level 5,75% sesuai ekspektasi pasar, kebijakan tersebut belum cukup untuk menurunkan yield SBN karena investor masih meminta premi risiko yang lebih tinggi. Ke depan, yield SBN dapat kembali meningkat apabila yield US Treasury tetap tinggi, rupiah terus tertekan, arus modal asing keluar, atau kebutuhan penerbitan surat utang pemerintah meningkat.

- Pemerintah memberikan relaksasi terhadap ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA bagi eksportir yang memiliki hubungan dagang dengan Amerika Serikat, China, Kanada, dan Australia. Berdasarkan perubahan aturan, eksportir sektor pertambangan dalam skema perjanjian bilateral cukup menempatkan minimal 30% DHE SDA selama paling singkat tiga bulan, berbeda dari ketentuan sebelumnya yang mewajibkan penempatan lebih besar dalam jangka waktu lebih panjang. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi eksportir dalam mengelola arus kas dan modal kerja, tetapi berpotensi mengurangi jumlah devisa yang tertahan di dalam negeri, sehingga pasokan valuta asing di perbankan dan dukungan terhadap stabilitas rupiah dapat menjadi lebih kecil. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan relaksasi diterapkan secara terukur dan tetap memberikan insentif agar eksportir mempertahankan dana lebih lama di dalam negeri.
- Persoalan utang pemerintah juga menjadi perhatian karena kemampuan membayar utang tidak cukup hanya diukur dari rasio utang terhadap PDB. INDEF menekankan bahwa beban bunga utang, kemampuan penerimaan negara, komposisi mata uang utang, struktur kepemilikan investor, dan penggunaan utang untuk kegiatan produktif harus menjadi indikator utama. Porsi investor asing dalam SBN telah menurun hingga sekitar 12,58%, yang membuat pasar obligasi domestik lebih tahan terhadap risiko capital flight, tetapi sekaligus meningkatkan ketergantungan pemerintah terhadap likuiditas domestik. Karena itu, akumulasi utang harus diarahkan untuk membiayai sektor produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, bukan sekadar menutup defisit anggaran, agar ruang fiskal pemerintah tidak semakin terbatas.
- Bank Indonesia terus memperluas insentif moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing. Kebijakan tersebut mencakup penguatan instrumen lindung nilai, pengembangan transaksi Local Currency Transaction, serta langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Tujuannya adalah mengurangi risiko nilai tukar, meningkatkan pasokan valuta asing, memperkuat stabilitas rupiah, dan menciptakan kondisi pasar yang lebih menarik bagi investor. Dalam situasi global yang dipengaruhi oleh kebijakan The Fed dan ketegangan geopolitik, kebijakan BI menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, daya tarik aset domestik, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Di Jawa Tengah, penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih terus berkembang, salah satunya terlihat di Kabupaten Blora. Sebanyak 45 KDMP telah mulai beroperasi setelah memiliki legalitas lengkap berupa NIB, NPWP, izin usaha, dan badan hukum dari Kementerian Hukum. Koperasi-koperasi tersebut mengembangkan usaha sesuai potensi dan kebutuhan wilayah, dengan 30 koperasi bermitra dengan Agrinas, 10 koperasi mengelola pangkalan LPG 3 kilogram, dan lima koperasi menjalankan usaha mandiri seperti toko sembako. Pemerintah Kabupaten Blora mendorong agar koperasi dikelola secara profesional dan memanfaatkan peluang kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, serta Bulog agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.
- Pengembangan koperasi di Jawa Tengah juga diikuti dengan upaya pengawasan dan peningkatan kualitas tata kelola agar koperasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di Kabupaten Batang, pemerintah daerah bersama Dekopinda berupaya mengawal kinerja koperasi agar tidak menimbulkan persoalan dan tetap menjalankan prinsip tanggung jawab serta integritas. Dari 304 koperasi yang tercatat masih aktif, hanya 135 yang benar-benar aktif, sehingga diperlukan pendampingan, pengawasan, dan perbaikan tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi harus diikuti dengan kualitas manajemen, pelayanan yang mudah bagi anggota, serta kemampuan usaha yang berkelanjutan agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat.

- Pada tingkat pemerintahan daerah, Kota Tegal menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kota Tegal dan menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Tegal juga menyatakan akan memperhatikan berbagai masukan DPRD serta menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK sesuai ketentuan dan rencana aksi yang telah disusun. Dengan demikian, pengelolaan APBD tidak hanya berkaitan dengan realisasi anggaran, tetapi juga dengan upaya meningkatkan kinerja aparatur, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara bertanggung jawab.
- Secara keseluruhan, berita Jawa Tengah memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga pemerintahan daerah. Pengoperasian koperasi di Blora, pengawasan koperasi di Batang, dan pertanggungjawaban APBD di Kota Tegal menunjukkan pentingnya kombinasi antara penguatan lembaga ekonomi rakyat, tata kelola yang profesional, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam konteks tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar keuangan, pembangunan ekonomi daerah menjadi semakin penting karena dapat memperkuat ketahanan masyarakat melalui akses terhadap kebutuhan pokok, pembiayaan, distribusi barang, dan aktivitas usaha lokal. Dengan demikian, rangkaian berita tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi global perlu dihadapi melalui kebijakan nasional yang adaptif sekaligus pembangunan daerah yang mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara langsung.

## Implikasi

- Penerapan tarif tambahan Amerika Serikat terhadap sejumlah negara berimplikasi pada semakin kuatnya kebijakan proteksionisme dalam perdagangan global. Negara-negara yang terkena tarif berpotensi menghadapi penurunan daya saing produk di pasar AS, sehingga perlu mencari pasar ekspor alternatif dan memperkuat hubungan dagang dengan negara lain.
- Kebijakan tarif tersebut dapat meningkatkan biaya perdagangan internasional karena perusahaan harus menanggung beban tarif dan menyesuaikan kembali jalur pasoknya. Kondisi ini berpotensi meningkatkan harga barang bagi konsumen serta mendorong perusahaan melakukan efisiensi dan diversifikasi sumber bahan baku.
- Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS dapat membuat perusahaan dan investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Perubahan tarif dan aturan perdagangan dapat memengaruhi lokasi produksi, ekspansi bisnis, serta keputusan perusahaan dalam membangun rantai pasok internasional.
- Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara mitranya dapat meningkatkan risiko fragmentasi ekonomi global. Negara-negara dapat membentuk kerja sama perdagangan alternatif dan memperkuat hubungan regional untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat.
- Risiko gangguan terhadap Selat Hormuz dapat memberikan tekanan besar terhadap pasokan energi dunia. Gangguan terhadap jalur perdagangan tersebut berpotensi meningkatkan harga minyak dan biaya pengiriman, sehingga negara-negara pengimpor energi menghadapi peningkatan biaya ekonomi.
- Kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik berpotensi mendorong inflasi global. Biaya bahan bakar yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya transportasi, produksi, distribusi, dan harga barang kebutuhan masyarakat.
- Meningkatnya ketidakpastian geopolitik dapat memperkuat kecenderungan investor untuk mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman. Akibatnya, negara-negara berkembang berpotensi mengalami tekanan arus modal keluar dan pelemahan mata uang.

- Perubahan arah investasi menuju sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, energi, dan komoditas strategis menunjukkan semakin pentingnya sektor-sektor tersebut dalam perekonomian global. Negara yang mampu mengembangkan sektor strategis tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi.
- Negara-negara berkembang perlu memperkuat stabilitas ekonomi dan kualitas kebijakan untuk mempertahankan kepercayaan investor. Stabilitas nilai tukar, inflasi, fiskal, serta kepastian regulasi menjadi semakin penting di tengah meningkatnya persaingan mendapatkan modal global.
- Ketidakpastian perdagangan global dan meningkatnya risiko geopolitik berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah. Apabila investor mengalihkan dana ke aset yang lebih aman, permintaan terhadap dolar AS dapat meningkat dan memberikan tekanan terhadap rupiah.
- Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor barang, bahan baku, energi, dan barang modal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi perusahaan dan pada akhirnya dapat memberikan tekanan terhadap harga barang serta daya beli masyarakat.
- Potensi kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan beban ekonomi Indonesia sebagai negara net importir minyak. Kenaikan harga minyak dapat memperbesar biaya impor energi dan meningkatkan tekanan terhadap subsidi serta kompensasi energi dalam APBN.
- Kenaikan harga energi juga dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi di dalam negeri. Dampaknya dapat dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat melalui meningkatnya biaya produksi serta harga berbagai barang dan jasa.
- Kenaikan yield SBN berimplikasi pada meningkatnya biaya pembiayaan pemerintah. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, beban bunga utang dapat meningkat dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pembangunan serta program prioritas lainnya.
- Pemerintah perlu menjaga agar utang digunakan untuk kegiatan yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan utang yang produktif akan membantu meningkatkan penerimaan negara dan menjaga kemampuan pemerintah dalam membayar kewajibannya.
- Relaksasi ketentuan DHE SDA memberikan ruang lebih besar bagi eksportir dalam mengelola modal kerja dan arus kas. Kebijakan ini dapat membantu kelancaran kegiatan usaha dan perdagangan, terutama bagi eksportir yang memiliki kebutuhan pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya.
- Namun, relaksasi DHE SDA juga berpotensi mengurangi pasokan valuta asing yang tersimpan di dalam negeri. Apabila valuta asing yang masuk dan bertahan di dalam negeri berkurang, tekanan terhadap likuiditas valuta asing dan stabilitas rupiah dapat meningkat.
- Kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat instrumen lindung nilai dapat membantu mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Hal ini penting bagi investor dan perusahaan yang memiliki transaksi dalam valuta asing sehingga risiko perubahan kurs dapat dikelola dengan lebih baik.
- Pengembangan transaksi mata uang lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia terhadap perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat.
- Insentif likuiditas dan kebijakan makroprudensial dapat membantu menjaga aliran pembiayaan kepada dunia usaha. Dengan demikian, sektor perbankan tetap dapat mendukung kegiatan ekonomi meskipun kondisi pasar keuangan global mengalami tekanan.
- Penerapan tarif AS berpotensi memberikan tekanan terhadap ekspor Indonesia, khususnya sektor manufaktur dan padat karya. Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, karet, dan elektronik perlu meningkatkan daya saing agar tetap mampu mempertahankan akses pasar.

- Indonesia perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Perluasan hubungan perdagangan dengan negara dan kawasan lain dapat mengurangi risiko apabila terjadi perubahan kebijakan tarif atau penurunan permintaan dari satu pasar tertentu.
- Industri nasional perlu meningkatkan penggunaan bahan baku domestik dan efisiensi produksi. Langkah tersebut dapat mengurangi dampak pelemahan rupiah dan kenaikan biaya bahan baku impor terhadap biaya produksi perusahaan.
- Tekanan terhadap kualitas kredit korporasi dapat meningkat pada sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap valuta asing dan bahan baku impor. Perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko, efisiensi biaya, dan strategi lindung nilai untuk menjaga kemampuan membayar kewajiban.
- Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Blora berpotensi memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. Koperasi dapat menjadi sarana untuk mengembangkan usaha distribusi kebutuhan pokok, LPG, pupuk, dan berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal.
- Kemitraan koperasi dengan perusahaan besar dapat memperluas akses masyarakat terhadap barang dan kebutuhan produksi. Kerja sama dengan berbagai pihak juga berpotensi meningkatkan kapasitas usaha koperasi serta memperkuat jaringan distribusi di daerah.
- Koperasi yang mengelola toko sembako dan distribusi kebutuhan masyarakat dapat membantu memperpendek rantai pasok. Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat desa.
- Penguatan koperasi dapat meningkatkan perputaran ekonomi lokal dan membuka peluang usaha baru. Jika dikelola secara profesional, kegiatan koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi anggota dan masyarakat sekitar.
- Masih adanya koperasi yang tidak aktif di Batang menunjukkan bahwa jumlah koperasi belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan ekonomi kerakyatan. Koperasi yang telah berdiri perlu didukung dengan kegiatan usaha yang jelas dan berkelanjutan agar benar-benar memberikan manfaat.
- Peningkatan kualitas tata kelola koperasi menjadi hal yang sangat penting. Pengurus perlu memiliki kemampuan manajemen, pengelolaan keuangan, pelayanan anggota, dan perencanaan usaha agar koperasi dapat berkembang secara sehat.
- Pengawasan terhadap koperasi perlu diperkuat untuk menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat. Transparansi laporan keuangan serta pengelolaan usaha yang bertanggung jawab dapat mencegah munculnya masalah dalam operasional koperasi.
- Pendampingan dari pemerintah daerah dan organisasi perkoperasian diperlukan untuk meningkatkan kapasitas koperasi. Pendampingan tersebut dapat membantu koperasi yang masih lemah dalam aspek manajemen, permodalan, maupun pengembangan usaha.
- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tegal berimplikasi pada semakin pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas pengelolaan pemerintahan daerah. Perbaikan tersebut dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mencegah terulangnya permasalahan yang sama.
- Pengelolaan APBD yang baik dapat mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.
- Secara keseluruhan, Jawa Tengah perlu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penguatan koperasi, pengembangan potensi ekonomi desa, dan pengelolaan APBD yang transparan dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global.

# Berita Senin 27 Juli

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi global pada 27 Juli 2026 masih dibayangi tingginya ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter bank-bank sentral dunia, serta ancaman perubahan iklim berupa Super El Niño. Konflik yang kembali memanas telah meningkatkan risiko inflasi global melalui kenaikan harga energi, sementara bank sentral seperti The Fed menghadapi dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, berbagai negara mulai menyesuaikan kebijakan ekonominya untuk menghadapi tekanan tersebut, sehingga pasar keuangan dunia bergerak lebih berhati-hati dan investor cenderung memilih aset yang dinilai lebih aman.

Amerika Serikat menjadi perhatian utama karena Federal Reserve menghadapi keputusan yang semakin sulit mengenai arah suku bunga. Meskipun inflasi sempat menunjukkan perlambatan, lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah, meningkatnya investasi di sektor kecerdasan buatan (AI), serta kebijakan tarif baru pemerintahan Donald Trump kembali memunculkan kekhawatiran terhadap inflasi yang lebih persisten. Perbedaan pandangan di kalangan pejabat The Fed menunjukkan bahwa peluang kenaikan suku bunga masih terbuka, sementara pasar terus menunggu sinyal yang lebih jelas mengenai arah kebijakan moneter yang akan sangat menentukan pergerakan pasar keuangan global dalam beberapa bulan ke depan.

Di kawasan Asia, kondisi ekonomi menunjukkan dinamika yang beragam. Pemulihan ekonomi China masih berlangsung namun belum merata karena pertumbuhan laba industri mulai melambat, konsumsi domestik masih lemah, dan sektor properti belum pulih sepenuhnya meskipun ekspor tetap menjadi penopang utama. Singapura kembali menunjukkan karakteristik kebijakan moneternya dengan mengendalikan inflasi melalui pengelolaan nilai tukar, bukan melalui suku bunga. Sementara itu, India berhasil mencatat pertumbuhan ekspor produk engineering yang kuat berkat meningkatnya permintaan dari berbagai negara, meskipun masih menghadapi risiko gangguan logistik akibat konflik di Timur Tengah.

Selain faktor geopolitik, ancaman Super El Niño diperkirakan menjadi tantangan baru bagi perekonomian dunia, terutama negara-negara berkembang. Fenomena tersebut berpotensi menyebabkan kekeringan, menurunkan produksi pangan, meningkatkan harga bahan makanan, dan memperpanjang tekanan inflasi. Akibatnya, banyak bank sentral diperkirakan akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama dibandingkan perkiraan sebelumnya. Negara-negara Asia seperti Indonesia, India, Vietnam, Thailand, hingga Filipina dinilai termasuk yang paling rentan terhadap dampak tersebut karena tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian dan impor pangan maupun energi.

Di Indonesia, perhatian utama pasar tertuju pada pengunduran diri mendadak Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang memunculkan kekhawatiran mengenai kesinambungan kebijakan moneter dan independensi bank sentral. Meskipun Destry Damayanti ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur BI sehingga operasional tetap berjalan normal, berbagai analis dalam dan luar negeri menilai bahwa kepastian mengenai kepemimpinan definitif menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Reaksi pasar langsung terlihat melalui pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta meningkatnya premi risiko Indonesia, meskipun sebagian besar ekonom meyakini arah kebijakan BI tidak akan berubah secara drastis dalam jangka pendek.

Tekanan eksternal juga menyebabkan arus modal asing keluar dari sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya suku bunga Amerika Serikat, meningkatnya minat investor terhadap sektor AI dan semikonduktor, serta sentimen risk-off global membuat investor lebih memilih menempatkan dana pada aset negara maju. Akibatnya, rupiah masih menjadi salah satu mata

uang Asia dengan pelemahan terdalam sepanjang tahun 2026, sementara investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk berinvestasi di pasar obligasi Indonesia. Meski demikian, sejumlah ekonom tetap optimistis bahwa valuasi aset Indonesia yang relatif murah, fundamental perusahaan yang masih baik, serta stabilitas kebijakan dapat menarik kembali investasi asing apabila kondisi global mulai membaik.

Di sektor kebijakan ekonomi domestik, pemerintah melakukan relaksasi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi beberapa negara mitra dagang utama. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan fleksibilitas arus kas eksportir dan menjaga daya saing perdagangan internasional. Namun, para ekonom mengingatkan bahwa relaksasi tersebut juga berpotensi mengurangi pasokan devisa di dalam negeri, melemahkan likuiditas valuta asing perbankan, mengurangi efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah, serta memperbesar risiko terhadap ketahanan eksternal apabila tidak disertai evaluasi dan pengawasan yang ketat.

Sementara itu, dampak pengetatan kebijakan moneter mulai dirasakan sektor perbankan nasional. Kenaikan BI Rate sejak Mei 2026 telah mendorong meningkatnya bunga kredit dan bunga deposito, khususnya pada kredit baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter mulai berjalan lebih efektif, meskipun di sisi lain biaya pembiayaan bagi dunia usaha dan masyarakat menjadi semakin tinggi. Perbankan masih berupaya menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan kredit, mengelola biaya dana, serta menjaga kualitas pembiayaan di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat.

Dari sisi pasar keuangan, investor masih melihat Surat Berharga Negara Indonesia memiliki daya tarik karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif. Namun, keberlanjutan arus modal asing tetap bergantung pada perkembangan global seperti keputusan The Fed, stabilitas harga minyak, kondisi geopolitik, serta keberhasilan pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas fiskal maupun nilai tukar rupiah. Pergantian kepemimpinan di BI juga menjadi faktor yang terus dipantau karena kredibilitas institusi dianggap lebih penting dibandingkan pergantian individu semata dalam menjaga kepercayaan pasar.

Adapun pada lingkup Jawa Tengah, meskipun tidak terdapat pemberitaan khusus mengenai perkembangan ekonomi daerah dalam dokumen ini, berbagai dinamika nasional dan global diperkirakan tetap akan memberikan dampak tidak langsung terhadap perekonomian provinsi tersebut. Kenaikan suku bunga, pelemahan rupiah, potensi kenaikan harga energi dan pangan akibat konflik geopolitik maupun Super El Niño, serta perubahan arus perdagangan internasional dapat memengaruhi aktivitas industri, ekspor, investasi, UMKM, sektor pertanian, dan daya beli masyarakat Jawa Tengah. Oleh karena itu, stabilitas kebijakan nasional, pengendalian inflasi, kelancaran distribusi pangan, serta keberhasilan menjaga kepercayaan investor akan menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah agar tetap berkelanjutan di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Bagi perekonomian Jawa Tengah, berbagai perkembangan ekonomi global dan nasional tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap sektor industri pengolahan, perdagangan, ekspor, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga, serta meningkatnya biaya logistik dan energi akibat konflik geopolitik dunia dapat meningkatkan biaya produksi berbagai sektor industri di Jawa Tengah, terutama industri tekstil, garmen, furnitur, makanan-minuman, dan manufaktur lainnya yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor maupun pasar ekspor. Di sisi lain, apabila kondisi ekonomi global kembali membaik dan permintaan ekspor meningkat, sektor industri berorientasi ekspor di Jawa Tengah memiliki peluang untuk kembali memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga stabilitas kebijakan nasional menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan aktivitas produksi di provinsi tersebut.

Selain sektor industri, ancaman Super El Niño serta tingginya ketidakpastian ekonomi global juga perlu menjadi perhatian bagi Jawa Tengah yang memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Risiko berkurangnya produksi pertanian akibat cuaca ekstrem berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan meningkatkan tekanan inflasi daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, mendukung kelancaran distribusi barang, serta mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan demikian, meskipun dokumen ini tidak memuat berita khusus mengenai Jawa Tengah, keseluruhan dinamika ekonomi internasional dan nasional yang dibahas tetap menjadi faktor eksternal yang akan memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode mendatang.

## Ringkasan

- Perekonomian global pada akhir Juli 2026 masih berada dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, karena dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan suku bunga bank-bank sentral utama, perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara besar, serta ancaman Super El Niño. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat prospek pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih berhati-hati, sementara inflasi global masih berisiko meningkat akibat kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, dan potensi penurunan produksi pangan di berbagai negara.
- Amerika Serikat tetap menjadi pusat perhatian pasar keuangan dunia karena kebijakan Federal Reserve akan sangat menentukan arah ekonomi global. Meskipun inflasi mulai menunjukkan tren perlambatan, kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah, meningkatnya investasi pada sektor kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta kebijakan tarif baru pemerintah Amerika Serikat menyebabkan sebagian pejabat The Fed masih mempertimbangkan peluang kenaikan suku bunga. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar global memilih bersikap hati-hati sambil menunggu keputusan kebijakan moneter berikutnya.
- Perkembangan ekonomi di kawasan Asia menunjukkan kondisi yang bervariasi antarnegara. China masih mengandalkan sektor ekspor sebagai penggerak utama ekonomi meskipun konsumsi domestik dan sektor properti belum pulih sepenuhnya. Singapura tetap mempertahankan kebijakan moneter berbasis penguatan nilai tukar untuk menjaga inflasi, sedangkan India mencatat pertumbuhan ekspor produk engineering yang cukup tinggi karena meningkatnya permintaan dari berbagai negara. Namun secara umum, negara-negara Asia masih menghadapi risiko perlambatan ekonomi akibat ketidakpastian global dan kenaikan biaya perdagangan internasional.
- Fenomena Super El Niño menjadi salah satu risiko ekonomi terbesar yang diperkirakan akan memengaruhi banyak negara di dunia. Kekeringan yang diprediksi terjadi di berbagai kawasan berpotensi menurunkan produksi pertanian, meningkatkan harga pangan, mengganggu pasokan energi, serta memperbesar tekanan inflasi. Oleh karena itu, banyak bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama agar inflasi tetap terkendali meskipun langkah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- India diperkirakan menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh Super El Niño. Curah hujan yang diproyeksikan berada di bawah normal berpotensi menurunkan produksi beras, gula, dan berbagai komoditas pertanian lainnya sehingga memicu kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut dapat memperbesar tekanan inflasi domestik serta mendorong bank sentral India untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat demi menjaga stabilitas ekonomi.
- Di kawasan Asia lainnya, negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Pakistan, dan Sri Lanka juga diperkirakan menghadapi tantangan yang serupa. Pelemahan nilai tukar mata uang, kenaikan harga energi dan pangan, serta tingginya ketidakpastian global

menyebabkan bank sentral di kawasan tersebut masih harus berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan suku bunga agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

- Amerika Latin menunjukkan dampak El Niño yang berbeda di setiap negara. Kolombia diperkirakan menghadapi kenaikan inflasi akibat terganggunya pembangkit listrik tenaga air dan meningkatnya harga pangan. Peru berisiko mengalami perlambatan ekonomi karena sektor pertanian dan perikanan terkena dampak cuaca ekstrem. Sebaliknya, Argentina justru diperkirakan memperoleh keuntungan melalui peningkatan curah hujan yang mampu meningkatkan produksi gandum, memperbesar ekspor, serta memperkuat penerimaan devisa negara.
- Di kawasan Afrika, ancaman perubahan iklim juga menjadi perhatian utama terhadap stabilitas ekonomi. Negara-negara seperti Kenya dan Afrika Selatan diperkirakan mengalami gangguan produksi pertanian akibat cuaca ekstrem sehingga berpotensi meningkatkan inflasi pangan. Bahkan lembaga pemeringkat internasional memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk kondisi fiskal dan menekan kualitas kredit beberapa negara Afrika apabila dampaknya semakin besar.
- Sementara itu, negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur diperkirakan tidak mengalami dampak El Niño sebesar kawasan lain. Investor masih memperkirakan bank sentral di Polandia, Hungaria, dan Rumania tetap memiliki ruang untuk memangkas suku bunga karena tekanan inflasi relatif lebih terkendali dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.
- Di Indonesia, perhatian utama pasar tertuju pada pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Peristiwa tersebut memunculkan ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter nasional sehingga memicu pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta meningkatnya kehati-hatian investor. Walaupun Destry Damayanti ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur BI, pasar masih menunggu kepastian mengenai penunjukan gubernur definitif yang dinilai akan sangat menentukan tingkat kepercayaan investor.
- Mayoritas analis dalam maupun luar negeri menilai bahwa faktor terpenting bukanlah pergantian figur, melainkan keberlanjutan independensi Bank Indonesia. Investor berharap BI tetap mampu menjalankan kebijakan moneter secara profesional tanpa tekanan politik sehingga stabilitas rupiah, inflasi, dan sistem keuangan nasional dapat terus terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global.
- Pelemahan rupiah hingga menembus kisaran Rp18.005 per dolar Amerika Serikat mencerminkan bahwa faktor domestik masih menjadi perhatian utama investor. Meskipun ketegangan Timur Tengah mulai mereda dan harga minyak mengalami penurunan, pasar tetap memberikan respons negatif terhadap proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia karena kredibilitas bank sentral dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
- Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi beberapa negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, China, Australia, dan Kanada. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelancaran perdagangan internasional dan meningkatkan fleksibilitas eksportir, namun para ekonom mengingatkan bahwa relaksasi tersebut juga dapat mengurangi jumlah devisa yang bertahan di dalam negeri sehingga likuiditas valuta asing perbankan berpotensi menurun.
- Menurut para ekonom, relaksasi DHE SDA memang memberikan manfaat bagi dunia usaha melalui peningkatan arus kas dan modal kerja eksportir, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah. Potensi devisa yang tidak lagi tertahan di dalam negeri diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala agar keseimbangan antara kepentingan ekspor dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

- Di sektor perbankan, dampak kenaikan BI Rate mulai terlihat melalui meningkatnya bunga kredit maupun bunga deposito. Kenaikan suku bunga acuan sejak Mei 2026 telah mulai ditransmisikan oleh perbankan ke berbagai jenis kredit, khususnya kredit baru. Kondisi tersebut menunjukkan kebijakan moneter mulai bekerja dalam mengendalikan inflasi, meskipun konsekuensinya biaya pembiayaan dunia usaha dan masyarakat menjadi lebih tinggi.
- Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia masih dinilai memiliki daya tarik bagi investor asing karena menawarkan imbal hasil yang relatif kompetitif. Namun keberlanjutan arus modal asing akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan The Fed, stabilitas rupiah, kondisi fiskal pemerintah, dinamika geopolitik dunia, serta keberhasilan Bank Indonesia mempertahankan kredibilitas kebijakan moneternya setelah terjadi pergantian kepemimpinan.
- Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia masih memiliki fundamental yang cukup kuat, tetapi harus menghadapi tantangan besar dari kombinasi tekanan global dan domestik. Stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, kelancaran perdagangan internasional, keberlanjutan investasi, serta koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang sisa tahun 2026.
- Bagi Jawa Tengah, meskipun dokumen ini tidak memuat pemberitaan ekonomi daerah secara khusus, berbagai perkembangan ekonomi internasional dan nasional tersebut tetap memiliki implikasi yang besar terhadap aktivitas ekonomi daerah. Industri pengolahan, tekstil, furnitur, makanan-minuman, perdagangan, serta UMKM di Jawa Tengah berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah, naiknya harga energi, serta meningkatnya bunga kredit. Oleh karena itu, efisiensi produksi dan peningkatan daya saing menjadi sangat penting agar sektor-sektor unggulan Jawa Tengah tetap mampu mempertahankan pertumbuhan.
- Selain sektor industri, sektor pertanian Jawa Tengah juga berpotensi menghadapi tantangan apabila dampak Super El Niño semakin besar. Risiko kekeringan dapat mengurangi hasil produksi pertanian dan meningkatkan harga pangan sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelancaran distribusi, serta mengendalikan inflasi daerah. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat berita khusus mengenai Jawa Tengah dalam dokumen, seluruh dinamika ekonomi global dan nasional tersebut diperkirakan akan tetap memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada periode mendatang.

## Implikasi

- Ketidakpastian ekonomi global diperkirakan akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan, karena konflik geopolitik di Timur Tengah, ancaman Super El Niño, serta arah kebijakan suku bunga bank-bank sentral dunia masih menjadi faktor utama yang memengaruhi aktivitas ekonomi internasional. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha dan investor cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan investasi maupun ekspansi bisnis sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan perdagangan dan investasi global.
- Kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat akan terus menjadi acuan utama bagi pergerakan pasar keuangan dunia. Apabila The Fed kembali menaikkan atau mempertahankan suku bunga pada level tinggi lebih lama, arus modal global diperkirakan akan semakin banyak mengalir ke aset-aset Amerika Serikat. Dampaknya, negara-negara berkembang akan menghadapi tekanan berupa pelemahan nilai tukar, meningkatnya biaya pendanaan, dan berkurangnya aliran investasi asing.
- Meningkatnya harga energi akibat konflik geopolitik berpotensi memperbesar tekanan inflasi di berbagai negara. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya transportasi, distribusi, dan produksi di hampir seluruh sektor ekonomi sehingga harga barang dan jasa cenderung meningkat. Kondisi tersebut dapat memperlambat pemulihan ekonomi dunia karena konsumsi masyarakat dan aktivitas industri menjadi lebih terbebani.

- Ancaman Super El Niño diperkirakan akan memperbesar risiko krisis pangan di sejumlah negara. Penurunan produksi pertanian akibat kekeringan dapat menyebabkan harga pangan dunia meningkat, memperbesar inflasi, dan mengurangi ketahanan pangan, terutama di negara-negara berkembang yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama produksi dan lapangan kerja.
- Negara-negara Asia diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pelemahan nilai tukar, kenaikan harga impor energi dan pangan, serta perlambatan perdagangan internasional dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, bank-bank sentral di kawasan Asia kemungkinan masih akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.
- Dampak El Niño di Amerika Latin dan Afrika menunjukkan bahwa perubahan iklim semakin menjadi faktor ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Negara-negara yang mengalami penurunan produksi pertanian berpotensi menghadapi kenaikan inflasi, penurunan ekspor, hingga pelemahan kondisi fiskal. Sebaliknya, negara yang memperoleh kondisi cuaca lebih baik seperti Argentina berpeluang meningkatkan produksi dan ekspor komoditas pertanian sehingga memperoleh tambahan devisa.
- Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan implikasi terhadap meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan domestik. Meskipun kebijakan Bank Indonesia diperkirakan tetap berlanjut di bawah kepemimpinan sementara Dstry Damayanti, pasar tetap membutuhkan kepastian mengenai gubernur definitif agar kepercayaan investor terhadap kredibilitas dan independensi bank sentral tetap terjaga.
- Pelemahan nilai tukar rupiah menunjukkan bahwa faktor kepercayaan investor memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Apabila proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia berlangsung cepat, transparan, dan tetap menjaga independensi kebijakan moneter, tekanan terhadap rupiah diperkirakan dapat berkurang. Sebaliknya, apabila ketidakpastian berlangsung lama, volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan berpotensi meningkat.
- Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia masih memiliki peluang menarik investasi asing, namun investor akan menjadi semakin selektif. Tingginya imbal hasil obligasi Indonesia memang meningkatkan daya tarik investasi, tetapi keputusan investor tetap akan dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan The Fed, stabilitas rupiah, kondisi fiskal nasional, dan kepastian arah kebijakan Bank Indonesia setelah pergantian kepemimpinan.
- Relaksasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) memberikan manfaat bagi eksportir, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Fleksibilitas yang lebih besar akan membantu arus kas dan daya saing perusahaan eksportir, namun berpotensi mengurangi jumlah devisa yang bertahan di dalam negeri sehingga likuiditas valuta asing perbankan menjadi lebih terbatas dan efektivitas stabilisasi rupiah dapat menurun apabila tekanan eksternal meningkat.
- Berkurangnya devisa yang tersimpan di dalam negeri dapat mengurangi ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Pasokan valuta asing yang lebih kecil berpotensi mempersempit ruang Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar ketika terjadi gejolak global. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi relaksasi DHE SDA agar manfaat bagi eksportir tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi.
- Kenaikan BI Rate yang mulai ditransmisikan ke bunga kredit menunjukkan bahwa kebijakan moneter telah mulai memengaruhi sektor riil. Di satu sisi, kenaikan bunga kredit membantu menekan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, namun di sisi lain meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha maupun masyarakat sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan investasi, konsumsi, dan ekspansi usaha.

- Perbankan nasional akan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan kualitas pembiayaan. Meningkatnya biaya dana akibat kenaikan bunga deposito membuat bank harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit agar risiko kredit bermasalah tetap terkendali, sekaligus tetap mampu menjaga profitabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Kepercayaan investor terhadap independensi Bank Indonesia menjadi faktor yang semakin penting dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Apabila pemerintah mampu memastikan bahwa kebijakan moneter tetap profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik, maka kepercayaan investor domestik maupun internasional berpotensi kembali meningkat sehingga mendukung stabilitas rupiah, obligasi, dan pasar saham.
- Secara keseluruhan, Indonesia perlu memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil untuk menghadapi tekanan global. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, serta sektor perbankan akan menjadi kunci dalam menjaga inflasi, memperkuat nilai tukar, mempertahankan arus investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
- Bagi Jawa Tengah, berbagai perkembangan internasional dan nasional tersebut berpotensi memengaruhi sektor industri pengolahan, manufaktur, tekstil, furnitur, makanan-minuman, serta UMKM yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Pelemahan rupiah dan kenaikan biaya energi dapat meningkatkan biaya produksi, sedangkan kenaikan bunga kredit dapat mengurangi kemampuan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi maupun investasi baru sehingga efisiensi usaha menjadi semakin penting.
- Sektor ekspor Jawa Tengah juga berpotensi menghadapi tantangan apabila permintaan global melemah akibat perlambatan ekonomi dunia. Industri berorientasi ekspor perlu meningkatkan produktivitas, diversifikasi pasar, serta efisiensi produksi agar tetap mampu bersaing di tengah meningkatnya biaya logistik dan ketidakpastian perdagangan internasional.
- Sektor pertanian Jawa Tengah juga perlu mewaspadai dampak Super El Niño sebagaimana menjadi perhatian dalam berita internasional. Apabila kondisi cuaca ekstrem menyebabkan penurunan produksi pangan, maka inflasi pangan daerah dapat meningkat dan memengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan, pengelolaan irigasi, kelancaran distribusi, serta pengendalian inflasi daerah menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi Jawa Tengah.

## **Berita Selasa 28 Juli**

### **Kesimpulan**

Kondisi ekonomi global pada 28 Juli 2026 masih diwarnai oleh tingginya ketidakpastian akibat kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap negara-negara mitra dagangnya. Amerika Serikat memperketat pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang terhubung dengan China di Vietnam untuk memastikan tidak terjadi praktik transshipment maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat menjadi dasar penerapan tarif baru. Di sisi lain, China mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas menjelang pertemuan Presiden Xi Jinping dan Donald Trump dengan menetapkan batas toleransi terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat serta memperingatkan Washington agar tidak memberikan sanksi kepada perusahaan kecerdasan buatan asal China. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan dagang kedua negara masih menjadi faktor utama yang membentuk arah perdagangan dan investasi dunia.

Ketegangan perdagangan tersebut kemudian memengaruhi ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter global. Meskipun tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh kenaikan harga energi akibat konflik

Timur Tengah, sebagian besar pelaku pasar meyakini Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga acuannya. Di sisi lain, Bank Negara Malaysia tetap optimistis mampu mencapai pertumbuhan ekonomi pada batas atas target karena inflasi masih terkendali, sedangkan Bank of England maupun Bank of Japan diperkirakan juga belum mengubah kebijakan moneternya. Dengan demikian, fokus bank-bank sentral dunia saat ini masih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang mulai pulih.

Kondisi tersebut membuat pasar keuangan global bergerak sangat hati-hati. Dolar Amerika Serikat tetap bertahan di dekat level tertingginya karena investor masih menunggu keputusan Federal Reserve, sementara mayoritas mata uang Asia berada dalam tekanan meskipun harga minyak mulai mengalami penurunan. Penguatan dolar didorong oleh tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat serta ekspektasi bahwa suku bunga akan tetap tinggi dalam waktu yang lebih lama. Oleh sebab itu, aliran modal internasional masih cenderung mengarah ke aset-aset dolar sehingga volatilitas pasar keuangan global tetap tinggi.

Dampak dari ketidakpastian global tersebut mulai terasa di Indonesia. Pelemahan rupiah semakin besar setelah muncul sentimen domestik berupa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang memunculkan kekhawatiran terhadap kesinambungan kebijakan moneter dan independensi bank sentral. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan nilai tukar rupiah melemah hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, tetapi juga diikuti kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara serta meningkatnya premi risiko Indonesia. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan dan kepastian arah pengelolaan ekonomi nasional.

Di tengah tekanan tersebut, berbagai indikator ekonomi domestik juga menunjukkan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Aktivitas belanja masyarakat memang masih tumbuh, tetapi lajunya mulai melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada saat yang sama, tingkat tabungan masyarakat terus menurun, sedangkan penggunaan pinjaman online, kartu kredit, dan layanan paylater meningkat cukup pesat. Bahkan sebagian besar pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi, sehingga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mulai lebih banyak ditopang oleh pembiayaan utang daripada peningkatan pendapatan. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa penguatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas agar konsumsi tetap berkelanjutan.

Selain menjaga stabilitas konsumsi masyarakat, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memperkuat kondisi fiskal negara. Bank Dunia merekomendasikan penurunan batas omzet Pengusaha Kena Pajak dari Rp4,8 miliar menjadi Rp500 juta agar basis perpajakan menjadi lebih luas dan penerimaan negara meningkat. Pada saat yang sama, pemerintah masih menghitung kebutuhan tambahan anggaran bagi daerah yang mengalami tekanan fiskal setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan pelayanan publik serta memenuhi kewajiban belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap ASN akibat keterbatasan anggaran. Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan masih melakukan pemetaan terhadap kondisi fiskal setiap daerah agar dapat menentukan bentuk dukungan yang tepat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan, sehingga pelayanan publik tetap berjalan dan kemampuan fiskal daerah dapat dipertahankan.

Sementara itu, berbagai berita mengenai rupiah juga menggambarkan bahwa pelemahan nilai tukar selama masa kepemimpinan Perry Warjiyo tidak semata-mata disebabkan oleh faktor domestik. Selama lebih dari delapan tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai guncangan global mulai dari perang dagang Amerika Serikat-China, pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, kenaikan agresif suku bunga Federal Reserve, hingga konflik Timur Tengah yang menyebabkan dolar Amerika Serikat

terus menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Meskipun rupiah mengalami depresiasi lebih dari 21 persen selama periode tersebut, pelemahannya masih lebih baik dibandingkan beberapa mata uang Asia lainnya sehingga menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi merupakan bagian dari dinamika ekonomi global yang lebih luas.

Di tingkat daerah, pemerintah di Jawa Tengah tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan meskipun kondisi ekonomi nasional dan global masih penuh tantangan. Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyesuaian APBD agar anggaran lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan persampahan. Pemerintah Kabupaten Jepara mendorong desa-desa mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui penguatan pariwisata, UMKM, serta penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur. Sementara itu, KEK Industri Batang kembali memperoleh penghargaan Anugerah Adi Hijau sebagai bukti bahwa pengembangan kawasan industri tetap diarahkan pada prinsip keberlanjutan dan penerapan tata kelola lingkungan yang baik.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi pada 28 Juli 2026 memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara dinamika ekonomi internasional, nasional, dan daerah. Ketidakpastian akibat perang dagang, kebijakan tarif, arah suku bunga global, dan penguatan dolar Amerika Serikat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Tekanan tersebut kemudian diperkuat oleh tantangan domestik berupa pelemahan rupiah, perlambatan kualitas konsumsi masyarakat, serta penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah. Di tengah situasi tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui reformasi kebijakan, penguatan fiskal, perlindungan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh isi berita menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan dari tingkat global hingga daerah menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.

## Ringkasan

- Perkembangan ekonomi internasional diawali dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Vietnam setelah otoritas bea cukai AS melakukan inspeksi terhadap sejumlah pabrik yang terhubung dengan perusahaan China di Vietnam. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan besarnya nilai tambah produk sebelum diekspor ke AS sekaligus mengusut dugaan praktik transshipment dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Langkah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa AS akan kembali memperluas kebijakan tarif terhadap Vietnam, sehingga dapat mengganggu aktivitas perdagangan dan rantai pasok global yang selama ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu pusat manufaktur dunia.
- Seiring meningkatnya tekanan terhadap Vietnam, hubungan dagang Amerika Serikat dan China juga kembali memanas menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping. China menetapkan batas toleransi terhadap tarif baru Amerika Serikat serta memperingatkan Washington agar tidak menjatuhkan sanksi kepada perusahaan kecerdasan buatan (AI) asal China. Perselisihan ini menunjukkan bahwa persaingan kedua negara tidak hanya terjadi dalam perdagangan barang, tetapi juga mulai bergeser pada persaingan teknologi, inovasi, dan penguasaan industri AI yang diperkirakan akan terus memengaruhi perekonomian global.
- Ketidakpastian perdagangan tersebut kemudian memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter dunia. Citigroup memperkirakan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga acuannya meskipun tekanan inflasi masih dipengaruhi kenaikan harga energi akibat konflik Timur Tengah. Sementara itu, pasar tetap memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga sehingga dolar Amerika Serikat bertahan di dekat level tertinggi dalam empat pekan dan investor menunggu keputusan The Fed, Bank of England, serta Bank of Japan sebagai penentu arah pasar keuangan global.
- Di tengah ketidakpastian tersebut, beberapa negara tetap berupaya menjaga stabilitas ekonominya. Bank Negara Malaysia optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 mampu mencapai

batas atas target 4–5% karena inflasi masih terkendali meskipun harga energi meningkat. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat tetap meyakini bahwa kebijakan tarif baru terhadap puluhan negara tidak akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian domestiknya, walaupun investigasi terhadap praktik perdagangan negara-negara mitra masih terus dilakukan.

- Perkembangan ekonomi global tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang dihadapkan pada tantangan fiskal dan penerimaan negara. Bank Dunia merekomendasikan agar pemerintah menurunkan batas omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Rp4,8 miliar menjadi Rp500 juta guna memperluas basis pajak, mengurangi praktik penghindaran pajak, memperbaiki rantai kredit PPN, serta meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah tanpa membebani seluruh pelaku usaha kecil.
- Selain persoalan perpajakan, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih menghitung kebutuhan tambahan anggaran bagi daerah yang mengalami tekanan fiskal agar tetap mampu membiayai pelayanan dasar, termasuk pembayaran gaji pegawai, sambil menunggu arahan Presiden mengenai mekanisme dan besaran bantuan yang akan diberikan.
- Masih berkaitan dengan kondisi fiskal daerah, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tidak mengambil langkah tergesa-gesa berupa pemutusan hubungan kerja ASN akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan masih melakukan pemetaan terhadap kemampuan fiskal setiap daerah agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing daerah sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
- Di sisi lain, kondisi konsumsi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas belanja masih tumbuh positif, namun kualitas pertumbuhannya mulai mengalami perlambatan. Data Mandiri Spending Index memperlihatkan pertumbuhan belanja mulai melandai dibandingkan kuartal sebelumnya, sedangkan tabungan masyarakat mengalami penurunan. Pada saat yang sama, penggunaan pinjaman online, kartu kredit, dan paylater meningkat cukup tajam sehingga menunjukkan bahwa sebagian konsumsi rumah tangga mulai ditopang oleh pembiayaan berbasis utang.
- Perubahan pola konsumsi tersebut diikuti dengan meningkatnya perhatian terhadap stabilitas pasar keuangan nasional. Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memicu kekhawatiran investor terhadap kesinambungan kebijakan moneter dan independensi bank sentral. Akibatnya rupiah terus melemah hingga bergerak di atas Rp18.000 per dolar AS, sementara imbal hasil Surat Utang Negara dan premi risiko Indonesia ikut meningkat akibat meningkatnya sikap hati-hati pelaku pasar.
- Meskipun rupiah mengalami tekanan, pelemahan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan faktor domestik karena juga dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan tingginya suku bunga global. Namun demikian, ketidakpastian mengenai kepemimpinan Bank Indonesia membuat investor semakin berhati-hati sehingga pasar memperkirakan Bank Indonesia perlu melakukan langkah intervensi apabila tekanan terhadap nilai tukar terus berlanjut demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
- Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan melalui berbagai alternatif pembiayaan. Salah satunya adalah rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti LRT, rumah sakit, sekolah, rumah susun, serta pengendalian banjir. Pemerintah pusat mengingatkan agar penerbitan obligasi dilakukan secara hati-hati sehingga tidak membebani keuangan daerah maupun pemerintahan berikutnya.
- Memasuki pemberitaan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyesuaian arah APBD 2026 melalui perubahan KUA-PPAS agar anggaran lebih fokus pada program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk meningkatkan

efektivitas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, serta pelayanan publik, sekaligus menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal hingga akhir tahun anggaran.

- Sementara itu, upaya memperkuat pembangunan ekonomi daerah juga terlihat di Kabupaten Jepara dan KEK Industropolis Batang. Pemerintah Kabupaten Jepara mendorong optimalisasi potensi desa melalui pengembangan wisata, pemberdayaan UMKM, digitalisasi pemasaran, dan penyelesaian persoalan infrastruktur agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Di sisi lain, KEK Industropolis Batang kembali meraih Anugerah Adi Hijau atas keberhasilannya menerapkan prinsip industri hijau dan tata kelola ESG secara berkelanjutan. Keseluruhan rangkaian berita tersebut menunjukkan bahwa meskipun ekonomi global masih dibayangi perang dagang, ketidakpastian kebijakan tarif, dan arah suku bunga dunia, Indonesia hingga pemerintah daerah di Jawa Tengah tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan investasi, serta mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.

## Implikasi

- Meningkatnya pengawasan Amerika Serikat terhadap pabrik-pabrik yang terhubung dengan China di Vietnam menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan global akan semakin ketat, sehingga perusahaan multinasional diperkirakan harus memperkuat transparansi rantai pasok, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan asal barang (rules of origin), serta memastikan proses produksi benar-benar memenuhi ketentuan perdagangan internasional agar terhindar dari risiko tarif tambahan maupun hambatan ekspor ke pasar Amerika Serikat.
- Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang kini turut merambah sektor kecerdasan buatan (AI) mengindikasikan bahwa persaingan ekonomi dunia tidak lagi hanya berfokus pada perdagangan barang, tetapi juga pada penguasaan teknologi strategis. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat kerja sama investasi lintas negara, meningkatkan fragmentasi teknologi global, serta mendorong banyak negara untuk memperkuat inovasi domestik agar tidak terlalu bergantung pada teknologi dari negara lain.
- Berlanjutnya ketidakpastian perdagangan internasional kemudian berimplikasi terhadap meningkatnya kehati-hatian bank sentral dunia dalam menentukan arah kebijakan moneter. Selama tekanan inflasi akibat gejolak geopolitik dan harga energi masih berlangsung, suku bunga global berpotensi tetap berada pada level tinggi, sehingga biaya pembiayaan internasional, investasi, dan aktivitas perdagangan dunia kemungkinan masih akan menghadapi tekanan dalam beberapa waktu ke depan.
- Kondisi tersebut juga menyebabkan pergerakan pasar keuangan global menjadi lebih sensitif terhadap setiap keputusan bank sentral utama, khususnya Federal Reserve. Penguatan dolar Amerika Serikat dan tingginya imbal hasil obligasi AS berpotensi mendorong perpindahan arus modal dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman, sehingga negara-negara berkembang perlu memperkuat stabilitas ekonomi domestiknya agar tetap mampu menjaga kepercayaan investor.
- Di tengah dinamika tersebut, optimisme Malaysia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas inflasi dan kebijakan subsidi energi menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dapat menjadi instrumen penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, meningkatnya kebutuhan subsidi juga berpotensi memperbesar beban anggaran pemerintah apabila harga energi global tetap tinggi dalam jangka waktu yang panjang.
- Bagi Indonesia, rekomendasi Bank Dunia mengenai penurunan batas omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) menunjukkan bahwa reformasi perpajakan akan semakin diarahkan pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Apabila rekomendasi tersebut diterapkan, penerimaan negara berpotensi meningkat, namun pemerintah juga perlu memastikan kesiapan

pelaku usaha, sistem administrasi perpajakan, serta memberikan pendampingan kepada usaha kecil agar proses transisi tidak menghambat aktivitas ekonomi.

- Di sisi fiskal, adanya evaluasi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan bahwa pemerintah pusat perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlangsungan pelayanan publik di daerah. Pemetaan kondisi fiskal setiap daerah menjadi langkah penting agar tambahan anggaran dapat diberikan secara tepat sasaran sehingga daerah yang mengalami tekanan keuangan tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan, membayar gaji pegawai, serta memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
- Sejalan dengan hal tersebut, peringatan pemerintah agar daerah tidak terburu-buru melakukan keputusan hubungan kerja ASN menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas birokrasi. Kebijakan yang lebih terukur diharapkan mampu mencegah terganggunya kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di tengah keterbatasan fiskal.
- Perubahan pola konsumsi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan pinjaman online, kartu kredit, dan paylater menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih bertahan, tetapi semakin bergantung pada pembiayaan utang. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang tanpa diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, maka risiko meningkatnya beban utang rumah tangga, penurunan kualitas kredit, serta perlambatan konsumsi domestik dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengendalian biaya hidup menjadi semakin penting untuk menjaga konsumsi tetap sehat dan berkelanjutan.
- Di sektor keuangan, pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia memberikan implikasi bahwa stabilitas pasar tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, tetapi juga oleh kepastian kelembagaan dan kesinambungan kebijakan moneter. Reaksi pasar yang ditunjukkan melalui pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara, serta meningkatnya premi risiko menunjukkan bahwa kepercayaan investor sangat bergantung pada kepastian arah kebijakan bank sentral. Oleh karena itu, proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia perlu berjalan secara cepat, transparan, dan mampu memberikan keyakinan kepada pelaku pasar agar volatilitas keuangan dapat segera mereda.
- Rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah mulai mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar transfer pemerintah pusat. Apabila dikelola secara hati-hati dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, obligasi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan yang efektif bagi pembangunan infrastruktur. Namun sebaliknya, apabila tidak disertai perencanaan yang matang, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko fiskal dan membebani anggaran pemerintah daerah pada periode berikutnya.
- Memasuki lingkup Jawa Tengah, penyesuaian APBD Kota Pekalongan menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin dituntut untuk mengalokasikan anggaran secara lebih selektif sesuai kebutuhan masyarakat. Prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus menjaga kualitas layanan pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi daerah.
- Selanjutnya, upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengembangkan potensi desa dan keberhasilan KEK Industropolis Batang menerapkan konsep industri hijau memberikan implikasi bahwa pembangunan daerah ke depan akan semakin diarahkan pada penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pengembangan UMKM, pariwisata desa, digitalisasi pemasaran, penyediaan infrastruktur, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) berpotensi meningkatkan daya saing investasi, memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperkuat kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

# Berita Rabu 29 Juli

## Kesimpulan

Perekonomian global pada Rabu, 29 Juli 2026 masih berada dalam fase ketidakpastian yang cukup tinggi akibat kombinasi perlambatan aktivitas ekonomi, tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda, serta meningkatnya risiko geopolitik. Kondisi tersebut tercermin dari menurunnya tingkat keyakinan konsumen di Amerika Serikat yang dipicu oleh memburuknya persepsi terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja. Masyarakat Amerika masih dibebani tingginya harga bahan bakar dan kebutuhan pokok sehingga menekan daya beli rumah tangga. Walaupun konsumsi masyarakat masih relatif bertahan dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, berbagai indikator menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai kehilangan momentum sehingga pelaku pasar semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

Perkembangan tersebut kemudian menjadi perhatian utama pasar keuangan dunia karena berlangsung bersamaan dengan rapat kebijakan Federal Reserve. Seluruh pelaku pasar menunggu arah kebijakan suku bunga yang akan ditetapkan The Fed di bawah kepemimpinan Kevin Warsh yang memilih tidak memberikan panduan mengenai langkah kebijakan berikutnya. Pendekatan komunikasi yang minim tersebut membuat tingkat ketidakpastian meningkat karena investor harus lebih mengandalkan perkembangan data ekonomi dibandingkan pernyataan bank sentral. Walaupun sebagian besar analis memperkirakan suku bunga tetap dipertahankan, peluang kenaikan suku bunga masih terbuka apabila tekanan inflasi kembali meningkat.

Situasi global semakin diperumit oleh memanasnya kembali konflik di Timur Tengah yang mendorong investor mengalihkan dananya ke aset-aset yang dianggap lebih aman. Akibatnya, dolar Amerika Serikat tetap bertahan pada level yang kuat terhadap sebagian besar mata uang dunia. Penguatan dolar tidak hanya dipengaruhi ekspektasi kebijakan moneter The Fed, tetapi juga meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven akibat risiko geopolitik. Kondisi tersebut menyebabkan mata uang negara-negara berkembang mengalami tekanan yang lebih besar, sementara volatilitas pasar keuangan internasional semakin meningkat.

Di tengah ketidakpastian tersebut, beberapa negara di Asia berupaya menjaga stabilitas ekonominya melalui kebijakan yang berbeda. China, misalnya, memilih memperkuat likuiditas sistem keuangan dengan menyuntikkan dana dalam jumlah besar melalui operasi reverse repo agar aktivitas perbankan dan pembiayaan ekonomi tetap berjalan normal. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah China berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonominya di tengah perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menjadi sinyal bahwa stabilitas sistem keuangan tetap menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya risiko eksternal.

Sementara itu, Malaysia menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup menggembirakan dengan semakin dekatnya status sebagai negara berpendapatan tinggi menurut klasifikasi Bank Dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, tingkat pengangguran yang terkendali, serta kuatnya investasi dan industri teknologi menjadi modal utama pencapaian tersebut. Namun demikian, pemerintah Malaysia tetap menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan nasional, melainkan dari kemampuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata melalui reformasi pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan keterampilan.

Berbagai dinamika internasional tersebut kemudian memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menguatnya dolar AS, meningkatnya ketidakpastian global, dan perubahan preferensi investor menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin besar hingga menembus level psikologis Rp18.100 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelemahan mata uang terdalam di kawasan

Asia sepanjang tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh perekonomian nasional.

Namun demikian, sejumlah ekonom menilai bahwa pelemahan rupiah tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor global. Faktor domestik justru dinilai memberikan pengaruh yang lebih besar, mulai dari meningkatnya persepsi risiko investor terhadap Indonesia, kenaikan Credit Default Swap (CDS), ketidakpastian arah kebijakan pemerintah, hingga berubahnya kondisi neraca perdagangan yang mengalami defisit setelah bertahun-tahun mencatat surplus. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kepercayaan investor mengalami penurunan sehingga arus modal asing menjadi lebih terbatas dan tekanan terhadap nilai tukar semakin besar.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas rupiah melalui optimalisasi bauran kebijakan moneter. Selain memanfaatkan BI Rate, Bank Indonesia juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, NDF, DNDF, serta optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah tersebut juga didukung dengan penguatan pengelolaan likuiditas perbankan, insentif makroprudensial, serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Walaupun demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa instrumen makroprudensial hanya berfungsi sebagai pelengkap. Stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi tetap membutuhkan dukungan kebijakan suku bunga apabila tekanan terhadap rupiah semakin meluas. Dunia usaha juga menilai bahwa keberhasilan menjaga nilai tukar tidak dapat hanya dibebankan kepada Bank Indonesia. Pemerintah harus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, meningkatkan kepercayaan investor, menjaga iklim investasi, serta mendorong peningkatan ekspor sehingga fundamental ekonomi nasional menjadi lebih kuat dalam menghadapi tekanan global.

Selain menghadapi tantangan di sektor moneter, pemerintah juga diperkirakan menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar pada semester II tahun 2026. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi, sedangkan penerimaan pajak diperkirakan mengalami perlambatan akibat restitusi pajak serta potensi shortfall penerimaan negara. Kondisi tersebut dapat menyebabkan defisit APBN melebar di atas target pemerintah apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan belanja yang lebih efektif. Pada saat yang sama, meningkatnya CDS Indonesia juga berpotensi menaikkan biaya penerbitan surat utang pemerintah sehingga ruang fiskal menjadi semakin terbatas.

Tekanan fiskal tersebut turut dirasakan oleh pemerintah daerah setelah terjadinya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Sejumlah daerah menghadapi kesulitan memenuhi belanja pegawai sehingga pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian tambahan anggaran kepada sekitar 490 pemerintah daerah setelah proses evaluasi dan rekonsiliasi data selesai dilakukan. Pemerintah juga menegaskan bahwa sebelum memperoleh tambahan anggaran, setiap daerah harus terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik.

Dari sisi ketenagakerjaan, tantangan ekonomi nasional juga tercermin dari meningkatnya jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun 2026. Apindo menjelaskan bahwa fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, perkembangan teknologi, serta restrukturisasi rantai pasok. Oleh karena itu, solusi utama tidak hanya terletak pada penanganan korban PHK, tetapi juga pada penciptaan iklim usaha yang mampu menjaga keberlangsungan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru secara berkelanjutan.

Di tengah berbagai tekanan tersebut, pemerintah tetap menunjukkan optimisme terhadap prospek jangka panjang perekonomian Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa

Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa dekade mendatang apabila mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun, beliau juga menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan bukan sekadar meningkatkan ukuran ekonomi, melainkan memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat nyata melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Optimisme tersebut turut tercermin pada perkembangan ekonomi di Jawa Tengah. Di tengah kondisi geopolitik global yang belum stabil, realisasi investasi Jawa Tengah pada semester I 2026 mencapai Rp48,54 triliun dengan lebih dari 55 ribu proyek yang berhasil menyerap lebih dari 213 ribu tenaga kerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Jawa Tengah masih tetap kuat. Pertumbuhan investasi tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan aktivitas industri, serta memperkuat struktur ekonomi daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain investasi, penguatan ekonomi Jawa Tengah juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja melalui sektor UMKM dan penguatan ketahanan pangan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa UMKM kini menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia yang kreatif serta adaptif. Pada saat yang sama, Bulog memperluas kemitraan dengan penggilingan padi rakyat, termasuk di Kabupaten Demak, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi masyarakat desa, menjaga kualitas cadangan beras pemerintah, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku usaha kecil dan sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, rangkaian berita ekonomi pada 29 Juli 2026 memperlihatkan keterkaitan yang sangat erat antara dinamika ekonomi global, kebijakan moneter internasional, kondisi fiskal nasional, stabilitas nilai tukar, dunia usaha, hingga perkembangan ekonomi daerah. Ketidakpastian global akibat inflasi, konflik geopolitik, dan kebijakan bank sentral dunia memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada nilai tukar rupiah dan kondisi fiskal. Namun, berbagai upaya pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan. Di sisi lain, keberhasilan Jawa Tengah dalam meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja melalui UMKM, serta memperkuat sektor pangan memberikan gambaran bahwa dengan kebijakan yang tepat, ekonomi daerah tetap mampu tumbuh dan menjadi salah satu penopang penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

## Ringkasan

- Perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi akibat perlambatan ekonomi, tekanan inflasi, dan meningkatnya risiko geopolitik. Di Amerika Serikat, keyakinan konsumen pada Juli kembali melemah karena masyarakat semakin pesimistis terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja. Tingginya harga bahan bakar serta kebutuhan pokok masih membebani pengeluaran rumah tangga, sementara aktivitas perekrutan tenaga kerja mulai melambat. Meskipun demikian, konsumsi masyarakat masih cukup kuat sehingga tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, walaupun risiko perlambatan ekonomi ke depan masih terus menjadi perhatian.
- Perhatian pasar keuangan internasional kemudian tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve yang dinilai sangat menentukan arah ekonomi global. Sebagian besar pelaku pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga acuannya, namun pendekatan Ketua The Fed Kevin Warsh yang tidak memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan berikutnya membuat ketidakpastian pasar semakin besar. Di sisi lain, konflik Amerika Serikat

dan Iran kembali meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven sehingga dolar AS bertahan di level yang kuat, sementara investor memilih bersikap lebih berhati-hati dalam menghadapi perkembangan ekonomi global.

- Selain Amerika Serikat, beberapa negara di kawasan Asia juga mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian masing-masing. Bank Sentral China (PBOC) menyuntikkan likuiditas lebih dari 806 miliar yuan melalui operasi reverse repo sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas sistem perbankan dan mempertahankan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Malaysia semakin mendekati status negara berpendapatan tinggi menurut klasifikasi Bank Dunia berkat pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang tetap rendah, tingkat pengangguran yang terkendali, serta dukungan investasi dan industri berbasis teknologi, meskipun pemerintah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas nasional.
- Perkembangan ekonomi internasional tersebut kemudian memberikan tekanan terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama melalui penguatan dolar Amerika Serikat. Mata uang Asia bergerak bervariasi, namun rupiah menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam setelah menembus level Rp18.100 per dolar AS. Penguatan dolar dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global dan ekspektasi kebijakan moneter Amerika Serikat sehingga arus modal lebih banyak mengalir menuju aset yang dianggap aman.
- Di Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian utama karena tidak hanya dipengaruhi oleh faktor global, tetapi juga faktor domestik yang dinilai lebih dominan. Ekonom CORE Indonesia menilai bahwa sekitar 60–70 persen tekanan terhadap rupiah berasal dari faktor dalam negeri, seperti meningkatnya persepsi risiko investor, tingginya Credit Default Swap (CDS), ketidakpastian arah kebijakan pemerintah, serta berubahnya kondisi neraca perdagangan yang mengalami defisit setelah bertahun-tahun mencatat surplus. Kondisi tersebut membuat kepercayaan investor terhadap aset Indonesia menjadi lebih berhati-hati sehingga tekanan terhadap rupiah semakin besar.
- Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas rupiah melalui optimalisasi bauran kebijakan moneter. BI tidak hanya mengandalkan BI Rate, tetapi juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, NDF, DNDF, serta optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), fasilitas swap, dan kebijakan makroprudensial. Selain menjaga stabilitas nilai tukar, BI juga memperkuat pengelolaan likuiditas, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, dan meningkatkan pembiayaan sektor prioritas agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global.
- Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kebijakan makroprudensial hanya berfungsi sebagai pelengkap dan bukan pengganti kebijakan suku bunga. Stabilitas rupiah tetap sangat bergantung pada efektivitas BI Rate, intervensi pasar valuta asing, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor. Kalangan pengusaha juga menilai bahwa upaya memperkuat rupiah tidak dapat hanya mengandalkan Bank Indonesia, tetapi membutuhkan koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal, peningkatan ekspor, serta perbaikan iklim investasi agar arus modal asing tetap masuk ke Indonesia.
- Selain tekanan pada sektor moneter, kondisi fiskal Indonesia juga diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih besar pada semester II tahun 2026. Kenaikan harga minyak dunia diperkirakan akan meningkatkan beban subsidi energi, sementara penerimaan pajak berpotensi mengalami tekanan akibat restitusi pajak dan kemungkinan terjadinya shortfall penerimaan negara. Di sisi lain, meningkatnya Credit Default Swap (CDS) Indonesia menyebabkan biaya penerbitan surat utang pemerintah menjadi lebih mahal sehingga dapat mempersempit ruang fiskal apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan belanja negara yang lebih efisien.
- Tekanan fiskal tersebut juga mulai dirasakan oleh pemerintah daerah setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka peluang memberikan tambahan anggaran kepada sekitar 490 pemerintah daerah yang

mengalami tekanan fiskal, terutama daerah yang kesulitan memenuhi belanja pegawai. Namun, sebelum memperoleh tambahan anggaran, pemerintah daerah diwajibkan melakukan efisiensi terlebih dahulu sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tetap menjaga disiplin fiskal nasional.

- Di sektor ketenagakerjaan, dunia usaha masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Apindo mencatat sekitar 126 ribu pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dunia usaha, fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara akibat perlambatan ekonomi global, restrukturisasi industri, perubahan teknologi, dan penyesuaian rantai pasok. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan perlu difokuskan pada penciptaan iklim usaha yang sehat sehingga investasi dan penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat.
- Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia dalam sekitar 25 tahun mendatang apabila mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan bukan sekadar meningkatkan ukuran ekonomi, melainkan memastikan hasil pertumbuhan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan pembangunan yang merata.
- Perkembangan positif juga terlihat di Provinsi Jawa Tengah yang tetap mampu mencatat pertumbuhan investasi meskipun kondisi ekonomi global masih bergejolak. Realisasi investasi Jawa Tengah pada semester I 2026 mencapai Rp48,54 triliun dengan lebih dari 55 ribu proyek yang berhasil menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Jawa Tengah masih terjaga dan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja.
- Selain investasi, pemerintah juga terus memperkuat sektor riil melalui pemberdayaan UMKM dan sektor pangan sebagai fondasi ekonomi masyarakat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa UMKM kini menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja sekaligus tempat membangun sumber daya manusia yang kreatif dan adaptif. Sementara itu, Bulog memperluas kemitraan dengan penggilingan padi rakyat, termasuk di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, guna meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, menjaga kualitas cadangan beras pemerintah, serta mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan usaha kecil di sektor pertanian.
- Secara keseluruhan, rangkaian berita menunjukkan bahwa kondisi ekonomi internasional dan nasional saling berkaitan erat. Ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat, konflik geopolitik, penguatan dolar AS, serta tekanan inflasi global memberikan dampak langsung terhadap pergerakan nilai tukar, arus investasi, dan kondisi fiskal Indonesia. Pada saat yang sama, berbagai tantangan domestik seperti pelemahan rupiah, meningkatnya persepsi risiko investor, tekanan fiskal, dan kondisi ketenagakerjaan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui koordinasi kebijakan yang lebih kuat.
- Meskipun menghadapi berbagai tekanan tersebut, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta pelaku usaha terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Berbagai kebijakan moneter, penguatan fiskal, dukungan terhadap investasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, serta peningkatan investasi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan menjaga sinergi antara kebijakan internasional, nasional, dan daerah akan menjadi faktor penting dalam

mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

## Implikasi

- Melemahnya keyakinan konsumen Amerika Serikat menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global masih menghadapi tantangan yang cukup besar, sehingga berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi dunia dalam beberapa bulan mendatang. Penurunan optimisme masyarakat terhadap kondisi bisnis, pasar tenaga kerja, serta tingginya biaya hidup dapat mengurangi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian AS. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat berpotensi melambat dan memberikan dampak terhadap perdagangan internasional, permintaan ekspor, serta aktivitas investasi di berbagai negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan AS.
- Ketidakpastian arah kebijakan Federal Reserve akan membuat volatilitas pasar keuangan global tetap tinggi karena investor cenderung menunda pengambilan keputusan investasi hingga memperoleh kepastian mengenai suku bunga. Pendekatan komunikasi Ketua The Fed Kevin Warsh yang tidak memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan selanjutnya membuat pasar lebih sensitif terhadap setiap rilis data ekonomi. Akibatnya, pergerakan nilai tukar, pasar saham, obligasi, maupun arus modal internasional berpotensi mengalami fluktuasi yang lebih besar sehingga meningkatkan risiko bagi negara berkembang yang bergantung pada aliran investasi asing.
- Memanasnya kembali konflik geopolitik di Timur Tengah memperbesar kecenderungan investor mengalihkan aset ke dolar Amerika Serikat sebagai instrumen safe haven, sehingga memperkuat posisi dolar terhadap mata uang dunia. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya tekanan terhadap mata uang negara berkembang, kenaikan biaya impor, serta bertambahnya beban pembayaran utang luar negeri yang menggunakan denominasi dolar AS. Apabila konflik berlangsung lebih lama, risiko kenaikan harga energi dan terganggunya stabilitas perdagangan global juga akan semakin besar.
- Langkah Bank Sentral China yang kembali menyuntikkan likuiditas dalam jumlah besar menunjukkan bahwa pemerintah China berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global. Kebijakan tersebut berpotensi menjaga stabilitas sektor keuangan, mempertahankan aktivitas dunia usaha, serta mendukung kelancaran perdagangan regional. Bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, stabilitas ekonomi China menjadi faktor penting karena dapat membantu menjaga permintaan terhadap komoditas dan produk ekspor di kawasan Asia.
- Keberhasilan Malaysia yang semakin mendekati status negara berpendapatan tinggi memberikan gambaran bahwa reformasi ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan industri teknologi, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia mampu mempercepat transformasi ekonomi nasional. Namun, perhatian pemerintah Malaysia terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas, dan kenaikan pendapatan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Kondisi ini menjadi pembelajaran penting bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
- Bagi Indonesia, penguatan dolar Amerika Serikat yang disertai pelemahan rupiah akan meningkatkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama melalui kenaikan biaya impor dan meningkatnya beban pembayaran utang luar negeri. Depresiasi rupiah juga dapat memperbesar tekanan inflasi apabila harga barang impor, bahan baku industri, maupun energi mengalami kenaikan. Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan biaya produksi dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat.

- Temuan bahwa pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik menunjukkan pentingnya penguatan fundamental ekonomi nasional dibandingkan hanya mengandalkan perbaikan kondisi global. Persepsi investor terhadap kepastian kebijakan, stabilitas fiskal, kesehatan sektor keuangan, serta kinerja neraca perdagangan akan menjadi faktor utama dalam menentukan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan, memperkuat koordinasi antarotoritas, serta meningkatkan kredibilitas pengelolaan ekonomi agar sentimen positif terhadap Indonesia dapat kembali meningkat.
- Komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat bauran kebijakan moneter memberikan implikasi bahwa stabilisasi rupiah akan dilakukan melalui kombinasi berbagai instrumen, bukan hanya mengandalkan perubahan BI Rate. Optimalisasi intervensi di pasar valuta asing, pemanfaatan SRBI, swap, DNDF, serta penguatan likuiditas diharapkan mampu mengurangi gejolak nilai tukar sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap memerlukan dukungan dari kondisi fiskal yang sehat, meningkatnya aliran modal asing, serta membaiknya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
- Pandangan ekonom bahwa kebijakan makroprudensial hanya merupakan pelengkap menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap memerlukan keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Implikasinya, koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah, OJK, serta anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan menjadi semakin penting agar kebijakan yang diterapkan saling mendukung. Dengan koordinasi yang kuat, stabilitas pasar keuangan dapat lebih terjaga tanpa mengorbankan pertumbuhan kredit, investasi, maupun aktivitas sektor riil.
- Perkiraan meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia pada semester II 2026 menunjukkan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan penerimaan negara. Potensi kenaikan subsidi energi akibat harga minyak dunia yang lebih tinggi, disertai kemungkinan shortfall penerimaan pajak, dapat memperlebar defisit APBN apabila tidak diantisipasi melalui efisiensi belanja, optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan pembiayaan yang lebih hati-hati. Selain itu, meningkatnya Credit Default Swap (CDS) juga berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang pemerintah sehingga ruang fiskal menjadi semakin terbatas.
- Rencana pemerintah memberikan tambahan anggaran kepada sekitar 490 pemerintah daerah menunjukkan bahwa tekanan fiskal tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga telah memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Kebijakan tersebut akan membantu menjaga keberlangsungan pelayanan publik, terutama pembayaran belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Namun, pemerintah tetap menekankan bahwa efisiensi anggaran daerah harus menjadi langkah pertama sehingga tambahan dana benar-benar diberikan kepada daerah yang memiliki kebutuhan paling mendesak dan telah melakukan penghematan secara optimal.
- Meningkatnya jumlah pekerja yang terdampak PHK memberikan implikasi bahwa dunia usaha masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi dan perubahan struktur industri. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran, menurunkan daya beli masyarakat, serta mengurangi konsumsi rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendorong investasi, memperkuat industri nasional, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperbaiki iklim usaha menjadi sangat penting agar dunia usaha mampu kembali melakukan ekspansi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
- Optimisme Presiden Prabowo mengenai peluang Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia memberikan implikasi bahwa pembangunan nasional harus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai target tersebut, peningkatan investasi, penguatan daya saing industri, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia harus berjalan secara terpadu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari

besarnya Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

- Di tingkat Jawa Tengah, meningkatnya realisasi investasi menunjukkan bahwa daerah masih memiliki daya tarik yang kuat bagi investor meskipun kondisi ekonomi global sedang bergejolak. Bertambahnya investasi berimplikasi pada meningkatnya pembangunan proyek, bertambahnya kapasitas industri, terciptanya lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas kebijakan daerah dan kemudahan investasi mampu menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional.
- Penguatan peran UMKM dan kemitraan Bulog dengan penggilingan padi rakyat memberikan implikasi yang luas terhadap pembangunan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional. Pemberdayaan UMKM akan memperbesar kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi lokal yang lebih inklusif. Sementara itu, prioritas Bulog terhadap penggilingan padi milik masyarakat akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat kesejahteraan petani, menjaga kualitas cadangan beras pemerintah, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat pedesaan. Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan dari tingkat internasional, nasional, hingga Jawa Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, investasi, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan sektor riil sehingga ekonomi mampu tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global.

## **Berita Kamis 30 Juli**

### **Kesimpulan**

Perkembangan ekonomi global pada 30 Juli 2026 masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi akibat kombinasi perlambatan ekonomi, tekanan inflasi, dan konflik geopolitik yang belum mereda. China sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 4,3% pada kuartal II-2026, di bawah target pemerintah. Kondisi tersebut dipicu oleh lemahnya konsumsi domestik, lesunya pasar tenaga kerja, serta krisis sektor properti yang belum pulih sepenuhnya. Meskipun demikian, pemerintah China belum memilih mengeluarkan stimulus fiskal besar-besaran, melainkan mempercepat belanja infrastruktur dan pengeluaran publik yang telah dianggarkan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa memperbesar risiko fiskal. Di sisi lain, sektor manufaktur, ekspor, dan industri berbasis kecerdasan buatan (AI) masih menjadi penopang utama perekonomian China sehingga pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas pertumbuhan dan reformasi struktural ekonomi.

Sementara itu, Amerika Serikat masih menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan inflasi sehingga Federal Reserve (The Fed) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%-3,75% melalui keputusan yang tidak bulat dengan hasil voting 9 berbanding 3. Meskipun suku bunga tidak dinaikkan, sebagian pejabat The Fed menginginkan pengetatan lanjutan karena inflasi masih jauh di atas target 2%. Ketua The Fed Kevin Warsh menegaskan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga bukan berarti bank sentral melunak terhadap inflasi, melainkan menilai kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS telah memperketat kondisi keuangan secara alami. Sikap tersebut menunjukkan bahwa The Fed masih mempertahankan kebijakan moneter yang cenderung hawkish dan siap melakukan penyesuaian apabila tekanan inflasi kembali meningkat akibat harga energi maupun faktor geopolitik.

Kebijakan The Fed tersebut kemudian memengaruhi pasar keuangan global dengan munculnya volatilitas yang cukup tinggi. Imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak ke level tertinggi dalam

hampir dua dekade, Wall Street terkoreksi tajam, sementara ekspektasi investor terhadap arah kebijakan moneter menjadi semakin tidak pasti. Walaupun dolar AS sempat melemah setelah keputusan suku bunga diumumkan, pernyataan Kevin Warsh mengenai pengetatan kondisi keuangan membuat pasar kembali melakukan penyesuaian sehingga berbagai aset keuangan bergerak fluktuatif. Ketidakpastian tersebut diperparah oleh kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Iran yang meningkatkan risiko inflasi global, sehingga pelaku pasar masih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

Dampak konflik Timur Tengah juga dirasakan oleh berbagai negara Asia, terutama negara yang bergantung pada impor energi. Singapura misalnya mengeluarkan tambahan paket bantuan sekitar S\$900 juta atau sekitar Rp12 triliun lebih untuk membantu rumah tangga dan pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya hidup akibat lonjakan harga energi dan pangan. Jepang juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya karena kenaikan harga energi diperkirakan menekan konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan laba dunia usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak hanya memengaruhi pasar energi dunia, tetapi juga memaksa banyak pemerintah meningkatkan intervensi fiskal guna menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan aktivitas ekonomi domestik.

Ketidakpastian global tersebut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan kawasan Asia. Sebagian besar mata uang Asia mengalami pelemahan terhadap dolar AS, termasuk rupiah yang bergerak di kisaran Rp18.060-Rp18.085 per dolar AS. Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh penguatan kembali dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, serta meningkatnya kehati-hatian investor global terhadap aset negara berkembang. Meskipun beberapa mata uang seperti yuan China dan won Korea Selatan masih mampu bertahan lebih baik, rupiah tercatat menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam sepanjang tahun 2026 sehingga stabilitas nilai tukar menjadi perhatian utama pemerintah dan Bank Indonesia.

Di Indonesia, perhatian utama tertuju pada kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Keputusan The Fed yang mempertahankan suku bunga dinilai memberikan ruang bagi BI untuk tidak kembali menaikkan BI-Rate dalam waktu dekat sehingga selisih suku bunga dengan Amerika Serikat tetap menarik bagi investor asing. Namun demikian, berbagai ekonom menilai BI tetap harus berhati-hati karena tekanan eksternal masih tinggi, terutama akibat kenaikan yield obligasi AS, risiko geopolitik, dan inflasi global yang belum sepenuhnya terkendali. Oleh karena itu, BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter seperti intervensi pasar valas, SRBI, DNDF, serta kebijakan likuiditas guna menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan arus modal asing masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan moneter domestik juga menghadapi dilema antara menjaga stabilitas dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin sepanjang Mei hingga Juni 2026 dinilai berhasil memperkuat nilai tukar rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar obligasi Indonesia. Akan tetapi, kenaikan suku bunga tersebut juga meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha dan masyarakat sehingga berpotensi menunda investasi, memperlambat konsumsi rumah tangga, serta menekan pertumbuhan sektor riil. Walaupun pertumbuhan kredit perbankan masih relatif tinggi, para ekonom mengingatkan bahwa suku bunga tinggi dalam jangka panjang dapat mengurangi permintaan kredit dan menghambat ekspansi ekonomi nasional apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya.

Selain isu moneter, perhatian juga tertuju pada keberlanjutan pengelolaan fiskal nasional. Pemerintah bersama DPR mulai membahas arah RAPBN 2027, termasuk usulan peningkatan anggaran kementerian/lembaga serta dorongan agar porsi anggaran pemerintah daerah diperbesar sesuai kewenangan yang dimiliki daerah. Berbagai pihak menilai pemerintah daerah memegang peran utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga alokasi anggaran perlu lebih proporsional. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan fiskal agar kebutuhan pembiayaan

pembangunan tetap dapat dipenuhi tanpa memperbesar beban utang negara di tengah tingginya biaya pendanaan akibat kenaikan suku bunga global.

Permasalahan fiskal daerah menjadi salah satu isu penting dalam pemberitaan nasional. Berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) menyebabkan banyak pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan, bahkan sebagian daerah kesulitan membayar gaji PPPK dan tunjangan kinerja ASN. APKASI meminta pemerintah pusat segera menyalurkan Dana Bagi Hasil yang masih tertunda agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tidak terganggu. Selain itu, sejumlah kepala daerah juga mengusulkan peninjauan kembali kebijakan perpajakan daerah karena penyederhanaan pajak dan retribusi dinilai mengurangi kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah pusat menyatakan tengah mengkaji pemberian tambahan bantuan kepada ratusan daerah yang mengalami tekanan fiskal dengan tetap menunggu keputusan Presiden.

Perekonomian Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang tetap positif melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada penguatan fondasi ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan dana cadangan untuk pembiayaan Pilgub 2029 sebagai langkah menjaga kesehatan fiskal daerah agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran. Dengan penyisihan anggaran secara bertahap mulai 2027, pembangunan daerah dan pelayanan publik diharapkan tetap berjalan optimal, sekaligus menjadi pembelajaran dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya yang sempat memberikan tekanan terhadap keuangan sejumlah daerah.

Di sektor perumahan, Jawa Tengah mencatat prestasi sebagai provinsi dengan realisasi Kredit Program Perumahan tertinggi di Indonesia, dengan nilai mencapai Rp4,96 triliun dan melayani 28.275 debitur. Capaian tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta sektor perbankan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bank Jateng juga memperoleh apresiasi sebagai Bank Pembangunan Daerah dengan penyaluran KPR subsidi dan FLPP tertinggi, sehingga mampu memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan aktivitas ekonomi daerah.

Di sisi lain, penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kota Semarang membina pelaku usaha batik melalui pelatihan di PLUT KUMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar hingga tingkat nasional maupun ekspor. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Demak membuka 2.480 lowongan kerja melalui Job Fair untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal serta memperkuat pemberdayaan UMKM. Revitalisasi Stasiun Tawang di Kota Semarang juga menjadi langkah strategis yang tidak hanya melestarikan bangunan bersejarah, tetapi juga mendorong pertumbuhan pariwisata, investasi, perdagangan, dan aktivitas UMKM. Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah terus memperkuat daya saing ekonomi melalui pembangunan yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor-sektor produktif secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rangkaian berita menunjukkan bahwa perekonomian dunia, Indonesia, hingga daerah masih menghadapi tantangan yang saling berkaitan. Perlambatan ekonomi China, kebijakan moneter ketat The Fed, konflik Iran yang mendorong kenaikan harga energi, serta volatilitas pasar keuangan global menjadi faktor eksternal yang memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Di dalam negeri, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan fiskal. Sementara itu, di tingkat daerah, termasuk berbagai pemerintah daerah di Indonesia seperti Kabupaten Bandung dan daerah-daerah lain yang disorot dalam berita, tantangan utama terletak pada keterbatasan anggaran, penyaluran dana transfer, serta kemampuan menjaga pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keseluruhan perkembangan tersebut menggambarkan bahwa koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan

pembangunan daerah akan menjadi faktor penentu dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

## Ringkasan

- Perlambatan ekonomi China masih menjadi perhatian utama ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal II-2026 hanya mencapai sekitar 4,3%, lebih rendah dari target pemerintah. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya konsumsi rumah tangga, tingginya tingkat pengangguran, masih tertekannya sektor properti, serta melemahnya permintaan domestik. Meskipun demikian, pemerintah China tetap memilih mempercepat belanja infrastruktur, investasi publik, dan pengembangan sektor teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan (AI) dibandingkan memberikan stimulus fiskal besar-besaran agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
- Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,50%-3,75%. Keputusan tersebut diambil melalui voting 9 banding 3 karena sebagian anggota The Fed masih menginginkan kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi yang belum kembali ke target 2%. Ketua The Fed Kevin Warsh menegaskan bahwa kebijakan moneter tetap berada pada posisi ketat meskipun suku bunga tidak dinaikkan, karena kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat telah memperketat kondisi keuangan secara alami.
- Kebijakan The Fed memicu volatilitas pasar keuangan global. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat naik ke level tertinggi dalam hampir dua dekade, indeks saham Wall Street mengalami pelemahan, sementara pelaku pasar kembali menyesuaikan ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Ketidakpastian tersebut membuat investor cenderung berhati-hati dalam menempatkan dana pada aset berisiko, khususnya di negara berkembang.
- Konflik geopolitik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang mendorong tingginya harga energi dunia. Gangguan terhadap pasokan minyak menyebabkan harga energi tetap tinggi sehingga meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara. Kondisi tersebut membuat banyak negara harus menyesuaikan kebijakan fiskal maupun moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
- Singapura mengeluarkan tambahan paket bantuan fiskal sekitar S\$900 juta untuk mengurangi dampak kenaikan biaya hidup. Bantuan tersebut ditujukan bagi rumah tangga dan pelaku usaha agar mampu menghadapi kenaikan harga energi dan pangan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Singapura berupaya menjaga konsumsi domestik sekaligus mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah tekanan global.
- Jepang juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya akibat kenaikan harga energi. Pemerintah memperkirakan konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan keuntungan dunia usaha akan mengalami perlambatan apabila tekanan harga energi terus berlanjut, sehingga prospek pertumbuhan ekonomi Jepang menjadi lebih terbatas dibandingkan perkiraan sebelumnya.
- Tekanan ekonomi global berdampak terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Rupiah bergerak melemah hingga kisaran Rp18.060-Rp18.085 per dolar Amerika Serikat akibat penguatan dolar AS, tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, dan meningkatnya kehati-hatian investor global terhadap aset negara berkembang. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi domestik.
- Bank Indonesia tetap menerapkan kebijakan moneter yang berhati-hati. Keputusan Federal Reserve mempertahankan suku bunga memberikan ruang bagi BI untuk tidak menaikkan BI-Rate dalam waktu dekat. Namun demikian, BI tetap mengoptimalkan berbagai instrumen moneter seperti intervensi pasar valas, SRBI, DNDF, dan pengelolaan likuiditas guna menjaga stabilitas rupiah serta mempertahankan kepercayaan investor.
- Kebijakan suku bunga tinggi masih menjadi tantangan bagi sektor riil. Walaupun mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan daya tarik investasi portofolio, suku bunga

yang tinggi juga meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha maupun masyarakat sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan investasi, konsumsi, dan penyaluran kredit perbankan.

- Pemerintah mulai menyusun arah kebijakan fiskal melalui pembahasan RAPBN 2027. Pembahasan tersebut mencakup usulan peningkatan anggaran kementerian/lembaga, penguatan peran pemerintah daerah, serta upaya menjaga keberlanjutan fiskal agar pembangunan tetap berjalan meskipun biaya pembiayaan utang masih relatif tinggi akibat kondisi global.
- Permasalahan transfer ke daerah masih menjadi perhatian nasional. Berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) menyebabkan sejumlah pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal, termasuk kesulitan membayar gaji PPPK, tunjangan ASN, dan membiayai program pembangunan. Pemerintah pusat masih mengkaji tambahan bantuan fiskal sekaligus mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil agar pelayanan publik tidak terganggu.
- Pemerintah juga didorong mempercepat proses restitusi pajak. Restitusi yang lambat dinilai mengurangi likuiditas dunia usaha, khususnya eksportir dan industri manufaktur. Pelaku usaha berharap pemerintah menyederhanakan administrasi dan memberikan kepastian waktu pencairan agar daya saing industri nasional tetap terjaga.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai membentuk dana cadangan untuk pembiayaan Pilgub 2029 sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal daerah. Dana tersebut akan disisihkan secara bertahap mulai tahun 2027 sehingga kebutuhan pembiayaan Pilgub tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal.
- Jawa Tengah menjadi provinsi dengan realisasi Kredit Program Perumahan tertinggi di Indonesia. Hingga 29 Juli 2026, total realisasi kredit perumahan mencapai Rp4,96 triliun dengan 28.275 debitur, menunjukkan keberhasilan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Bank Jateng memperoleh apresiasi sebagai Bank Pembangunan Daerah dengan penyaluran KPR subsidi dan FLPP tertinggi. Program tersebut menawarkan bunga hanya 5% per tahun, subsidi Rp4 juta, bebas BPHTB, serta tenor hingga 20 tahun sehingga semakin memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah layak huni.
- Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat daya saing UMKM batik melalui pelatihan di PLUT KUMKM. Program ini membekali para pengrajin dengan peningkatan kualitas produksi, teknik membatik, inovasi desain, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar sehingga batik Semarang diharapkan mampu bersaing di pasar nasional bahkan ekspor.
- Pemerintah Kabupaten Demak menggelar Job Fair dengan menyediakan 2.480 lowongan kerja dari 30 perusahaan. Program tersebut bertujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, menekan angka pengangguran, memperkuat kerja sama antara dunia usaha dan pencari kerja, serta mendorong perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal melalui proses transfer pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pekerja Indonesia.
- Kadin Fest yang diselenggarakan bersamaan dengan Job Fair menjadi sarana memperkuat pengembangan UMKM di Demak. Pemerintah daerah memberikan pendampingan mengenai pemasaran, akses permodalan, serta promosi produk lokal agar UMKM mampu berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
- Revitalisasi Stasiun Tawang Semarang diharapkan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Selain melestarikan bangunan cagar budaya, revitalisasi tersebut diproyeksikan meningkatkan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, transportasi, serta membuka peluang lebih besar bagi perkembangan UMKM di kawasan sekitar sehingga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
- Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan arah yang positif melalui penguatan fiskal daerah, perluasan akses pembiayaan perumahan, peningkatan kualitas UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur strategis. Berbagai program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga pertumbuhan

ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Jawa Tengah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

## Implikasi

- Perlambatan ekonomi China berpotensi menekan pertumbuhan perdagangan dan investasi global. Melemahnya konsumsi domestik, belum pulihnya sektor properti, serta pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah target menunjukkan bahwa permintaan terhadap berbagai komoditas dan produk impor kemungkinan akan tetap terbatas. Kondisi tersebut dapat mengurangi aktivitas perdagangan internasional, memperlambat investasi lintas negara, serta memengaruhi negara-negara mitra dagang yang selama ini bergantung pada pasar China, sehingga pemulihan ekonomi global diperkirakan berlangsung lebih lambat dibandingkan perkiraan sebelumnya.
- Keputusan Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi menunjukkan bahwa tekanan inflasi global masih menjadi perhatian utama. Meskipun tidak kembali menaikkan suku bunga, sikap The Fed yang tetap hawkish mengindikasikan bahwa biaya pinjaman global diperkirakan masih akan bertahan tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini dapat memperlambat aktivitas investasi, meningkatkan biaya pembiayaan bagi dunia usaha, serta membuat pemulihan ekonomi dunia berlangsung secara lebih bertahap karena pelaku usaha dan investor cenderung menahan ekspansi usahanya.
- Volatilitas pasar keuangan internasional diperkirakan akan tetap tinggi selama ketidakpastian kebijakan moneter dan geopolitik belum mereda. Kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat serta perubahan ekspektasi investor terhadap arah kebijakan The Fed berpotensi mendorong perpindahan modal menuju aset yang dianggap lebih aman. Akibatnya, pasar saham, pasar obligasi, maupun nilai tukar di berbagai negara masih akan mengalami fluktuasi yang cukup besar sehingga meningkatkan risiko investasi global.
- Konflik geopolitik di Timur Tengah akan terus meningkatkan risiko inflasi dunia melalui kenaikan harga energi. Apabila gangguan pasokan minyak berlanjut, biaya produksi dan distribusi di berbagai sektor ekonomi akan meningkat sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi tersebut dapat memaksa banyak bank sentral mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama, sehingga pertumbuhan ekonomi global menjadi semakin terbatas.
- Langkah Singapura dan Jepang memperkuat kebijakan fiskal menunjukkan bahwa pemerintah harus semakin adaptif dalam menjaga daya beli masyarakat. Tambahan bantuan sosial maupun penyesuaian kebijakan ekonomi menjadi instrumen penting untuk mengurangi dampak kenaikan biaya hidup akibat inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Secara keseluruhan, kondisi ekonomi global menunjukkan bahwa risiko eksternal masih akan menjadi tantangan utama bagi perekonomian dunia. Perlambatan pertumbuhan, inflasi yang masih tinggi, kebijakan moneter ketat, dan konflik geopolitik saling memengaruhi sehingga menciptakan ketidakpastian yang dapat berdampak pada perdagangan, investasi, serta stabilitas pasar keuangan internasional dalam beberapa waktu ke depan.
- Tekanan ekonomi global berpotensi meningkatkan tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Penguatan dolar Amerika Serikat, tingginya imbal hasil obligasi AS, serta perpindahan arus modal ke aset yang lebih aman dapat menyebabkan rupiah tetap berada dalam tekanan. Apabila kondisi tersebut berlangsung cukup lama, biaya impor bahan baku dan energi akan meningkat sehingga dapat memengaruhi inflasi domestik serta menambah beban biaya produksi bagi dunia usaha.
- Bank Indonesia diperkirakan akan tetap mengutamakan stabilitas makroekonomi dibandingkan mendorong pelonggaran moneter. Dengan kondisi global yang masih belum stabil, BI

kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati melalui optimalisasi intervensi di pasar keuangan dan pengelolaan likuiditas. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara di tengah tekanan eksternal.

- Suku bunga yang masih tinggi dapat memperlambat aktivitas ekonomi nasional apabila berlangsung dalam jangka panjang. Dunia usaha akan menghadapi biaya pembiayaan yang lebih mahal sehingga ekspansi investasi berpotensi tertunda, sementara masyarakat juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi maupun pengajuan kredit. Dampaknya, pertumbuhan sektor riil dapat melambat meskipun stabilitas makroekonomi relatif terjaga.
- Pembahasan RAPBN 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan belanja negara, dukungan terhadap pembangunan daerah, serta pengendalian defisit anggaran agar ruang fiskal tetap tersedia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan fiskal yang lebih terarah akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
- Tekanan fiskal daerah menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlambatan transfer dana maupun terbatasnya kapasitas fiskal daerah dapat menghambat pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran hak ASN. Oleh karena itu, percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil dan penyusunan skema bantuan fiskal yang lebih tepat sasaran menjadi langkah penting agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
- Dorongan percepatan restitusi pajak dapat meningkatkan likuiditas dunia usaha dan memperkuat daya saing industri nasional. Apabila proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat dan efisien, perusahaan akan memiliki arus kas yang lebih baik untuk mendukung kegiatan operasional, meningkatkan investasi, serta memperluas kapasitas produksi. Hal tersebut pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.
- Secara keseluruhan, Indonesia perlu terus memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil agar mampu menghadapi tekanan ekonomi global. Stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, keberlanjutan fiskal, serta peningkatan investasi harus berjalan secara seimbang sehingga ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga meskipun risiko eksternal masih tinggi.
- Pembentukan dana cadangan Pilgub 2029 menunjukkan pentingnya perencanaan fiskal daerah yang berkelanjutan. Penyisihan anggaran secara bertahap akan mengurangi tekanan terhadap APBD pada saat penyelenggaraan Pilkada sehingga pemerintah daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan program prioritas lainnya tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
- Keberhasilan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan realisasi Kredit Program Perumahan tertinggi akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Meningkatnya pembangunan rumah akan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa keuangan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah layak huni, program tersebut juga memperkuat aktivitas ekonomi lokal secara berkelanjutan.
- Optimalisasi penyaluran KPR subsidi oleh Bank Jateng memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudahan memperoleh rumah melalui bunga yang rendah dan berbagai subsidi pemerintah akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan sekaligus mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program strategis nasional.
- Program pelatihan UMKM batik di Kota Semarang berpotensi meningkatkan daya saing industri kreatif daerah. Peningkatan kualitas produk, inovasi desain, dan kemampuan

pemasaran akan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat posisi batik Semarang sebagai salah satu produk unggulan Jawa Tengah.

- Penyelenggaraan Job Fair di Kabupaten Demak diperkirakan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah. Kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha akan mempercepat proses penempatan tenaga kerja, sementara transfer pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pekerja lokal akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga mampu mendukung produktivitas industri di masa mendatang.
- Pengembangan UMKM melalui Kadin Fest akan memperkuat ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. Pendampingan usaha, promosi produk lokal, serta perluasan akses pemasaran diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi semakin besar.
- Revitalisasi Stasiun Tawang Semarang diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi kawasan sekitarnya. Selain meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi dan melestarikan bangunan bersejarah, revitalisasi tersebut akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, jasa, investasi, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan UMKM di sekitar kawasan stasiun.
- Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penguatan fiskal daerah, pembangunan sektor perumahan, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur saling mendukung dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Apabila seluruh program tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, Jawa Tengah berpeluang memperkuat daya saing regional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.